

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF

Edisi Maret | Tahun 2025 No. 57

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif | Atraktif | Substantif



*Sambut Lahirnya
Danantara*

***Wujudkan Asta
Cita Presiden
Prabowo***

Amin, Ak., M.M.



Innallaaha ya`murukum an tu`addul-amaanaati ilaa ahli-haa wa idzaa hakamtum bai-nan-naasi an tahkumuu bil`adl.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (An-Nisa: 58).

Di antara sumber kerusakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah jika hukum tidak ditegakkan secara berkeadilan. Bukan saja hak-hak warga negara tidak dapat terpenuhi dengan baik tapi juga menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada sesama warga bangsa dan institusi negara.

Dalam hal ini ada dua titik tekan, satu, hukum ditegakkan jika terjadi pelanggaran. Ini yang dinamakan supremasi hukum. Dua, hukum ditegakkan secara berkeadilan. Inilah misi dan tujuan utama dari penegakan hukum.

Tegaknya supremasi hukum akan melahirkan suatu kepastian. Kepastian tentang yang benar (al-haq) dan mana yang salah (al-bathil). Keadilan menuntut kejujuran dan objektivitas, artinya tidak berpihak kecuali kepada kebenaran dan rasa keadilan itu sendiri.

Kita kerap mendengar pernyataan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bersupremasi hukum. Itu



artinya hukum menjadi panglima di republik ini. Akan tetapi, jujur kita akui wajah supremasi hukum kita masih karut-marut. Potret pelanggaran hukum terjadi dimana-mana.

Amil contoh, kalau kita duduk di pinggir jalan saja, dengan mudah kita menemukan banyak pelanggaran hukum sederhana terjadi: serobot lampu merah atau markah jalan, berkendara tanpa helm, kendaraan naik trotoar, buang sampah sembarangan, dll.

Pelanggaran hukum lain yang lebih besar pun terjadi dan menjadi berita sehari-hari mulai dari penipuan, perampokan, pelecehan, pembunuhan, transaksi narkoba, hingga perdagangan manusia, pembalakan hutan, eksploitasi sumber daya alam, dan korupsi. Tidak sedikit dari pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh

orang-orang terpadang mulai public figure, pengusaha hingga pejabat negara bahkan aparat.

Mirisnya kita mendapati persepsi penegakan hukum seperti 'tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.' Hukum juga masih dipersepsi tebang pilih. Hukum tidak berpihak pada korban dan rakyat miskin. Ini artinya hukum tidak atau belum memenuhi rasa keadilan.

Kita mendukung supremasi hukum di republik ini. Lebih dari itu, kita membutuhkan hukum yang tegak secara berkeadilan.

ertama, kita butuh hukum yang berdiri tegak, berdiri di tengah, dan tidak condong pada kepentingan kekuasaan. Kedua, kita butuh hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya tajam kepada yang bawah (rakyat jelata dan kawula ailit) tapi juga harusnya lebih tajam kepada pela-

ku kriminal elit dan kelas atas.

Ketiga, kita butuh hukum yang bisa membedakan antara kriminal (murni) dan kriminalisasi (kasus). Keempat, kita butuh proses hukum yang bijak melihat suatu kasus menyangkut kelompok lemah dan kelompok rentan dan mendukung upaya restorative justice sehingga terpenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pemimpin dan penegak hukum yang adil mendapat tempat istimewa di mata Allah dan Rasulullah SAW.

Pertama, Rasulullah SAW menekankan betul pentingnya keadilan dalam memutuskan perkara hukum. Beliau bersabda, "Barang siapa yang menjadi hakim lalu menghukumi dengan adil, niscaya ia akan dijauhkan dari keburukan." (HR Tirmidzi).

Kedua, Rasulullah SAW menjelaskan tiga tipologi hakim

dalam memutus perkara. Beliau bersabda, "Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga. Seseorang yang menghukumi secara tidak benar, padahal ia mengetahui mana yang benar maka ia masuk neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk neraka. Dan, seorang hakim yang menghukumi dengan benar maka ia masuk surga." (HR Tirmidzi).

Ketiga, Rasulullah SAW menekankan betapa beratnya tanggung jawab seorang hakim di hadapan Allah SWT. Beliau bersabda, "Barang siapa mengharap menjadi seorang hakim maka (tugas dan tanggung jawab) akan dibebankan kepada dirinya. Dan barang siapa tidak menginginkannya maka Allah akan menurunkan malaikat untuk menoleng dan membimbingnya dalam kebenaran." (HR Tirmidzi). Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang diberi jabatan hakim atau diberi kewenangan untuk memutuskan suatu hukum di antara manusia, sungguh ia telah dibunuh tanpa menggunakan pisau." (HR Tirmidzi)

Oleh karena itu, kita sangat menaruh hormat kepada setiap aparat penegak hukum yang masih tegak dan setia membela kebenaran dan keadilan. Kita semua berharap supremasi hukum tegak di republik ini dan hukum tegak membela kebenaran dan keadilan.



image istimewa

Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukungan Kebijakan Pro Rakyat Presiden Prabowo

Jakarta (26/02) — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk optimis pada Pemerintah. Dalam 100 hari sudah banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

"Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk mensukseskannya," tegas Jazuli. Selain itu, lanjut Jazuli,

"Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk mensukseskannya,"

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Anggota Komisi I DPR RI

banyak transformasi dalam tata kelola pemerintahan, program, dan anggaran termasuk efisiensi besar-besaran APBN dan APBD agar dapat fokus untuk membiayai program-program pro rakyat yang riil dan konkrit.

Presiden juga mentransformasi pengelolaan sumber daya nasional, BUMN dan industri strategis nasional agar menjadi sumber pendapatan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Presiden sangat kuat keberpihakan dan komitmennya pada kemandirian dan kedaulatan nasional terutama sektor pangan menuju swasembada, termasuk bagaimana menyejahterakan para petani, peternak, dan nelayan.

Anggota DPR Dapil Banten ini mengurai berbagai kebijakan Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program makan bergizi gratis. Kenaikan upah minimum nasional. Penghapusan kridit macet UMKM. Kenaikan gaji

guru dan guru honorer. Program 3 juta rumah dan pembangunan rumah untuk rakyat kecil. Diskon 50 persen tarif listrik.

Cek kesehatan gratis di hari ulang tahun. Penurunan biaya haji (BPIH). Pembatalan kenaikan PPN dan hanya berlaku untuk barang mewah. Pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi nasional.

"Juga kenaikan HPP gabah, singkong, dan jagung. Subsidi pupuk petani. Investasi besar pada sektor pertanian. Pencairan THR untuk ASN dan pegawai swasta di bulan Maret. Diskon tarif toll selama libur lebaran. Pengendalian stabilitas harga pangan, dan lain sebagainya," terang Jazuli.

Untuk itu, Fraksi PKS mengajak seluruh rakyat dan elemen masyarakat kompak dalam mendukung program-program pro rakyat Presiden Prabowo. Semakin kompak rakyat mendukung program pro rakyat pemerintah maka semakin efektif kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kreatif Atraktif Substantif



Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
Ketua Fraksi PKS DPR RI



SOSIAL MEDIA
Fraksi PKS DPR RI



Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Hapus Content Pro-Palestina, Aleg PKS Dukung Amnesty Internasional Laporkan META pada SEC

Jakarta (01/03) -- Sejumlah organisasi Hak Asasi Manusia, mengklaim bahwa Meta (perusahaan induk dari Facebook dan Instagram) membatasi konten pro-Palestina di platform mereka.

Human Rights Watch (HRW) menilai tindakan ini sebagai bentuk sensor daring yang sistematis. Lebih dari 15 juta postingan media sosial berbahasa Ibrani yang menghasut kekerasan terhadap Palestina tidak dimoderasi sejak Oktober 2023.

Sementara itu, konten Palestina secara sistematis ditekankan. Pada 23 Januari 2025, Amnesty International, bersama dengan Open Society Justice Initiative dan Victim Advocates International, mengajukan keluhan whistleblower kepada SEC (Securities and Exchange Commission).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendukung organisasi Amnesty Internasional melaporkan META lantaran telah menyensor dan menghapus konten pro-Palestina.

Lebih Jauh Kang Aher menilai tindakan META tersebut merupakan suatu bentuk tindakan yang mendukung kekerasan atau bahkan genosida terhadap rakyat Palestina yang dilakukan Israel.

"Oleh karena itu, kita dukung Organisasi HAM interna-

sional seperti Human Right Watch (HRW), Amnesty International, serta Open Society Justice Initiative dan Victim Advocates International melaporkan keluhan whistleblower kepada SEC. Lantaran META membatasi konten pro-Palestina serta content atau berita yang terkait dengan tindakan brutal Israel terhadap rakyat sipil di Gaza-Palestina khususnya sejak Oktober 2023. Tindakan tersebut, secara tidak langsung menunjukkan keperpihakan META terhadap genosida di Gaza-Palestina," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS ini saat dihubungi awak media Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI Periode 2024-2029

ini mengungkapkan bahwa tindakan META yang dianggap berpihak dan mendukung kekerasan terhadap genosida khususnya di Gaza-Palestina perlu perhatian khusus.

Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Digital perlu memanggil perwakilan Meta Indonesia untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait penghapusan konten pro-Palestina tersebut.

"Komitmen Komisi I DPR RI dalam menjaga kebebasan berekspresi dan mendukung perjuangan rakyat Palestina, serta memastikan bahwa platform media sosial beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai mitra kerja Kemkomdig, kita mendorong pemanggilan perwakilan META Indonesia untuk klarifikasi dan menjelaskan hal tersebut," demikian tutup Kang Aher mengakhiri wawancara.

"Komitmen Komisi I DPR RI dalam menjaga kebebasan berekspresi dan mendukung perjuangan rakyat Palestina, serta memastikan bahwa platform media sosial beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan pemerintahan Indonesia.

**Dr. H. AHMAD
HERYAWAN, Lc., M.Si.**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



image istimewa

Komisi II FPKS Aus Hidayat Nur Harap PSU Dibeberapa Wilayah Tanpa Masalah Lagi

Jakarta (26/02) --- Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur mewanti-wanti agar pemungutan suara ulang (PSU) yang akan digelar mendapatkan pengawasan lebih ketat terhadap penyelenggaranya

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan PSU pada 25 daerah dengan rincian 15 daerah diperintahkan menggelar PSU di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 10 daerah menggelar PSU di TPS tertentu.

"Angka 25 daerah ini cukup besar dan menjadi pertanda bahwa penyelenggaraan pilkada kemarin masih jauh dari sempurna. Karena itu, PSU nanti harus menjadi perbaikan dengan tidak mengulangi kesalahan serupa atau keteledoran lain yang menyebabkan pemilihan jadi berlarut-larut," ucap Aus di Jakarta melalui pers rilis, Selasa, (25/02/2025).

Biasanya, imbuhnya, saat PSU politik uang jauh lebih masif dan terencana dilakukan ol-

eh pihak yang curang. Terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga diharapkan PSU yang digelar harus tuntas dan tanpa sengketa lagi. Maka pengawasan yang ketat menjadi syaratnya.

Tidak lupa Aus mengapresiasi kerja keras Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan sengketa yang terjadi di sekian banyak pilkada.

"MK telah bekerja secara maraton dan cukup keras belakangan ini. Hasilnya pun secara keseluruhan cukup memuaskan kita semua. Masyarakat harus menghargai para hakim konstitusi," ujar Aus.

Pemungutan suara ulang di beberapa tempat nanti sedianya digelar dalam waktu yang berbeda dari bulan Maret 2025 hingga April 2025.

"MK telah bekerja secara maraton dan cukup keras belakangan ini. Hasilnya pun secara keseluruhan cukup memuaskan kita semua. Masyarakat harus menghargai para hakim konstitusi,"

KH. AUS HIDAYAT NUR

Anggota Komisi II DPR RI

Soroti Isu Korupsi Dana Desa,

Ateng Sutisna: Kepala Daerah Harus Lebih Tegass Bina Kepala Desa

Jakarta (22/02) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyoroti masih maraknya kasus korupsi dana desa yang menghambat kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kepala daerah, terutama bupati, memiliki peran penting dalam membina kepala desa agar tidak menyalahgunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.

“Aturan sudah jelas, dana desa itu harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Tapi faktanya, kita masih mendengar ada kepala desa yang tergoda untuk korupsi. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Ateng.

Ia menekankan bahwa jika dana desa dikelola dengan baik dan optimal, maka kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga, tetapi juga terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD).

“Ketika PAD naik, desa makin maju. Dan pada akhirnya, kepala desa pun akan mendapatkan pendapatan yang lebih layak dari peningkatan kesejahteraan daerahnya sendiri, tanpa perlu mengambil jalan pintas yang melanggar hukum,” tegasnya.

Ateng juga menyoroti perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Menurutnya, perpanjangan ini seharusnya menjadi momentum bagi kepala desa untuk bekerja dengan lebih baik, bukan malah mempercepat keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak etis.

“Delapan tahun itu bukan

waktu yang sebentar. Kepala desa bisa berpikir panjang, bagaimana membangun desanya dengan benar. Jangan malah berpikir bagaimana memperkaya diri dengan cara yang salah,” kata Ateng.

Lebih lanjut, Ateng menyarankan agar kegiatan retreat bagi kepala daerah yang sedang dijalankan saat ini dijadikan sebagai ajang untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi di tingkat desa.

Ia mengusulkan agar dalam kegiatan tersebut, kepala daerah menandatangani pakta integritas yang menegaskan komitmen mereka dalam membina dan mengawasi kepala desa secara lebih serius.

“Kegiatan retreat yang sedang berjalan ini jangan hanya jadi ajang seremonial atau diskusi biasa. Ini bisa jadi momentum bagi kepala daerah untuk benar-benar berkomitmen dalam memberantas korupsi di wilayahnya masing-masing. Buat pakta integritas, lalu jalankan pengawasan yang lebih ketat terhadap kepala desa,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, Ateng Sutisna menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan pengawasan terhadap dana desa, termasuk memberikan masukan kepada pemerintah agar sistem pengelolaan dan pengawasannya diperketat.



“Kami di DPR akan terus memastikan bahwa kebijakan terkait dana desa ini tidak hanya sebatas aturan di atas kertas, tetapi juga diterapkan dengan serius di lapangan. Kepala daerah harus tegas, kepala desa harus jujur, dan masyarakat harus ikut mengawasi,”

Ir. H. ATENG SUTISNA

Anggota Komisi II DPR RI

“Kami di DPR akan terus memastikan bahwa kebijakan terkait dana desa ini tidak hanya sebatas aturan di atas kertas, tetapi juga diterapkan

dengan serius di lapangan. Kepala daerah harus tegas, kepala desa harus jujur, dan masyarakat harus ikut mengawasi,” pungkasnya.



image istimewa

Polemik Band Sukatani, Komisi III FPKS Nasir Djamil Usulkan Jadi Duta Polri Presisi

Jakarta (22/02) — Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PKS M Nasir Djamil mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tidak 'tipis kuping' dengan lirik lagu yang dinyanyikan oleh kelompok Band Sukatani yang berjudul, 'Bayar Bayar Bayar'.

Menurut Nasir Djamil, Kepolisian adalah bagian dari masyarakat sipil yang selama ini selalu berusaha mengimbangi demokrasi dan tidak alergi dengan kritik.

"Setahu saya justru Kapolri Jenderal Sigit pernah mengadakan perlombaan mural dan stand up komedi yang isinya mengkritik institusi kepolisian.

Lalu apa benar vokalis Sukatani Novi Citra Idriyati dipecat gara-gara membawakan lagu itu bersama kelompok bandnya?", tanya Nasir.

Jika benar maka Nasir sangat menyayangkan langkah pemecatan itu. Sebab itu bukan saja melanggar hak asasi manusia tapi telah merendahkan profesi seorang guru.

Apalagi, kata Nasir, Menteri HAM RI Natalius Pigi juga telah menyatakan penolakan atas pemecatan itu.

"Saya baca di media sosial Menteri HAM Natalius Pigi meminta vokalis Novi melapor ke Kakanwil HAM di Jawa Tengah atau ke Kementerian HAM", ujar Nasir.

Legislator asal Aceh itu juga meminta agar pihak

sekolah dimana Novi mengajar sejalan dengan sikap dan pikiran Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sebab Kapolri tidak mempermasalahkan lirik lagu 'Bayar Bayar Bayar' tersebut.

"Tentu tidak dipungkiri bahwa masih ada polisi yang nakal. Tapi polisi yang baik dan menjaga nama institusi jauh lebih banyak", ujar Nasir.

Karena itu Nasir berharap agar vokalis Sukatani itu jangan dipecat dan dapat mengajar seperti biasa.

"Bahkan saya usulkan kepada Kapolri agar kelompok Band Sukatani dijadikan duta Polri untuk mengembalikan citra Polri Presisi," tutup Anggota DPR RI dari Dapil Aceh I ini.

"Setahu saya justru Kapolri Jenderal Sigit pernah mengadakan perlombaan mural dan stand up komedi yang isinya mengkritik institusi kepolisian. Lalu apa benar vokalis Sukatani Novi Citra Idriyati dipecat gara-gara membawakan lagu itu bersama kelompok bandnya?",

Dr. H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI



image istimewa

Aleg PKS : Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan Pola Berulang yang Harus Diatasi

Jakarta (28/02) --- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almsyhari, menyoroti kenaikan harga pangan yang kembali terjadi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Menurutnya, fenomena ini sudah menjadi pola berulang setiap tahun dan seharusnya dapat dikendalikan dengan kebijakan yang lebih tepat dan terkoordinasi.

“Kami di Komisi IV terus mendorong pemerintah untuk lebih proaktif. Jangan sampai setiap tahun masyarakat harus menghadapi situasi yang sama tanpa ada solusi nyata.

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

“Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran memang selalu terjadi, tapi bukan berarti ini sesuatu yang wajar atau tidak bisa diatasi. Pemerintah harus mengambil langkah yang lebih efektif untuk menstabilkan harga agar tidak memberatkan masyarakat,” ujar Abdul Kharis dalam keterangannya di Jakarta.

Sebagai Wakil Rakyat di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, pangan, dan maritim, Abdul Kharis menilai bahwa lonjakan harga ini dapat dicegah dengan perencanaan yang lebih matang, baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun pengawasan stok.

“Jika pemerintah bisa memperkuat koordinasi antar kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog, lonjakan harga ini bisa dikendalikan. Stabilisasi stok sejak jauh hari serta pengawasan terhadap praktik

spekulasi yang memainkan harga harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Abdul Kharis juga menekankan pentingnya penguatan cadangan pangan nasional serta optimalisasi jalur distribusi agar pasokan tetap terjaga dan tidak menimbulkan kelangkaan yang memicu kenaikan harga.

“Kami di Komisi IV terus mendorong pemerintah untuk lebih proaktif. Jangan sampai setiap tahun masyarakat harus menghadapi situasi yang sama tanpa ada solusi nyata. Operasi pasar harus lebih gencar dilakukan dan ketersediaan bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, serta daging harus benar-benar dipastikan aman,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya bertindak reaktif setelah harga sudah naik, tetapi melakukan antisipasi sejak awal guna memastikan harga pangan tetap stabil, terutama di momen-momen penting seperti Ramadan dan Lebaran.

Anggota FPKS Saadiah Uluputty Dorong Pemerintah Perkuat Hilirisasi Perikanan dan Stabilitas Pasokan Ikan

Jakarta (28/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyoroti perlunya penguatan hilirisasi sektor perikanan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam pertemuan ini, ia meminta pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih optimal guna mendukung industrialisasi dan stabilitas pasokan ikan nasional.

Politisi PKS ini menyoroti kelangkaan ikan di beberapa daerah, termasuk Ambon dan Makassar, yang seharusnya menjadi lumbung ikan nasional.

"Dari data KKP, produksi ikan Januari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 3,06 juta ton. Namun, beberapa kota seperti Makassar, Ambon, Palembang, dan Surabaya berpotensi mengalami kekurangan pasokan. Ini anomali yang perlu dijelaskan," ujar Saadiah.

Ia menegaskan bahwa

pemerintah perlu memperkuat konsep Giant Cold Storage agar rantai pasok perikanan lebih stabil dan distribusi ikan merata ke seluruh wilayah.

"Hilirisasi hasil perikanan harus sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita kelima, yaitu industrialisasi sumber daya alam. Ini kesempatan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan," tambahnya.

Selain itu, Saadiah yang juga Anggota Banggar DPR ini juga mempertanyakan efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

"KKP telah menetapkan sanksi administratif bagi pelaku

pagar laut ilegal dengan nilai denda Rp48 miliar. Namun, apakah sanksi ini cukup memberikan efek jera? Apakah ada kebijakan baru untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan?" tanyanya.

Terkait isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), ia mengungkapkan bahwa persoalan ini berkorelasi langsung dengan potensi kelangkaan pasokan ikan.

"Dalam alokasi perlindungan sosial, subsidi BBM nelayan mencapai 19,41 juta kiloliter. Bagaimana KKP berkoordinasi dengan Pertamina agar nelayan benar-benar mendapatkan akses BBM bersubsidi?" tegasnya.

Legislator dapil Maluku ini juga meminta KKP menjelaskan keterlibatannya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan Rp71 triliun.

"Bagaimana pola pengaturan dan tata kelola pasokan ikan untuk program ini? Dari mana sumber ikannya, bagaimana pembiayaan dan mekanisme distribusinya?" ujarinya.



"Dari data KKP, produksi ikan Januari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 3,06 juta ton. Namun, beberapa kota seperti Makassar, Ambon, Palembang, dan Surabaya berpotensi mengalami kekurangan pasokan. Ini anomali yang perlu dijelaskan,"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Dalam penutupannya, Saadiah menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

"Kami ingin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya

fokus pada produksi, tetapi juga distribusi dan hilirisasi. Ini penting agar nelayan sejahtera dan masyarakat mendapatkan akses pangan bergizi dengan harga stabil," tutup Saadiah Uluputty.



Politisi PKS Riyono Caping : Lakukan Audit Tata Ruang Laut di Kasus Pagar Laut Tangerang dan Bekasi

Jakarta (28/02) --- Raker komisi IV dan KKP yang dilakukan hari Kamis 27 Februari 2024 mengungkap beberapa cacatan penting akan perkembangan pagar laut Tangerang yang menjadi atensi publik.

Laporan menteri KKP kepada komisi IV memberikan penjelasan sejauh mana tindakan yang sudah di ambil oleh menteri, yang penting adalah penetapan siapa pelaku pembuat pagar laut sudah di temukan.

"Pertama komisi IV memberikan apresiasi bahwa KKP sudah menjalankan tugas mulai penyegelan tgl 9 Januari dan kemudian melakukan pemeriksaan, sampai penetapan siapa yg bertanggungjawab teknis terhadap pembangunan pagar Laut," papar Riyono Caping Aleg DPR FPKS

Kedua lapsing komisi IV dan KKP meminta untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait penyelidikan lebih luas terhadap berbagai kerugian yang timbul akibat pembangunan ilegal pagar laut ini.

"KKP memberikan keterangan bahwa ada denda administrasi dan denda keuangan yang sampai 48 M. Menurut saya, penetapan denda uang itu belum utuh dan perlu pengecekan ulang terhadap kerugian material dan immaterial dengan Audit Tata Ruang Laut secara independen. Libatkan kampus dan

akademisi" tambah Riyono.

Riyono menjelaskan bahwa Audit tata ruang laut adalah suatu proses evaluasi dan penilaian terhadap pengelolaan dan penggunaan ruang laut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan ruang laut tersebut sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta tidak merusak lingkungan laut.

Tujuan Audit Tata Ruang Laut, pertama Memastikan kesesuaian dengan peraturan, kedua Memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan

ruang laut sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku

ketiga Mengidentifikasi potensi konflik Mengidentifikasi potensi konflik antara berbagai kegiatan yang dilakukan di ruang laut. Keempat Meningkatkan efisiensi pengelolaan: Meningkatkan efisiensi pengelolaan ruang laut dengan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan

kelima Melindungi lingkungan laut Melindungi lingkungan laut dari kerusakan yang dapat disebabkan oleh kegiatan manusia.

"KKP dengan peraturan yang sudah dikelaurkan, Permen KP no 30 tahun 2021 dan PP no 32 th 2019 memberikan ruang luas untuk bisa dibuka dengan terang benderang sampai aktor utamanya, amanatnya ada waktu 3 bulan buat membereskan," tambah Riyono.

"KKP memberikan keterangan bahwa ada denda administrasi dan denda keuangan yang sampai 48 M. Menurut saya, penetapan denda uang itu belum utuh dan perlu pengecekan ulang terhadap kerugian material dan immaterial dengan Audit Tata Ruang Laut secara independen. Libatkan kampus dan akademisi"

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Komisi IV DPR RI



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Bahagia Menyambut
RAMADHANA
KAREEM 1446 H

*Ayo Saling
Berbagi &
Peduli*





image istimewa

Sambut Lahirnya Danantara, Fraksi PKS Dorong Pengelola Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

Jakarta (24/02) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyambut positif kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bagian dari penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

Pembentukan Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan visi besar Asta Cita yang bertujuan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menegaskan peran strategis Danantara dalam mendukung pencapaian Asta Cita yang menjadi visi besar pembangunan nasional.

Amin menambahkan Danantara ini bisa berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas. Kemajuan di sektor energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produksi pangan dapat meningkatkan daya saing global Indonesia dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan misi Asta Cita.

"Lahirnya Danantara adalah momentum penting untuk memperkuat ekosistem BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saya berharap pengelola Danantara dapat bekerja keras, profesional, dan

inovatif dalam menjalankan mandat besar ini," ujar Amin.

Ia menyebut bahwa dengan pengelolaan investasi yang efektif, Danantara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Amin juga mengingatkan pentingnya penerapan good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan Danantara.

Menurutnya, tata kelola yang baik akan menjadi fondasi dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan transparansi kepada publik.

Setiap investasi yang dilakukan Danantara harus diumumkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi yang kuat. Hal ini untuk mencegah potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam pengelolaan.

"Saya mendorong pengelola Danantara untuk selalu bersikap profesional, menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, dan terbuka kepada publik. Dengan demikian, kepercayaan

Sambut Lahirnya Danantara, Fraksi PKS Dorong Pengelola Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

« SEBELUMNYA

masyarakat dapat terjaga dan Danantara bisa menjadi contoh holding BUMN yang berintegritas," tambahnya.

Terkait model pengelolaan Danantara, Amin menilai model pengelolaan yang diterapkan di China bisa menjadi referensi. Di China, BUMN dikelola dengan sistem holding yang kuat, profesional, memiliki struktur yang jelas, dan didukung pengawas-

an ketat dari pemerintah.

"Sistem ini terbukti mampu mendorong efisiensi dan produktivitas tinggi.

Model investasi yang diterapkan di China antara lain dengan menginvestasikan kembali laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepenuhnya untuk memperbesar skala usaha dan meningkatkan kontribusi ekonomi," ungkapnya.

Jika aset dikelola secara profesional dan amanah, kemu-

dian di investasikan di sektor yang strategis bisa mendatangkan investor yang nilainya berlipat. Namun Amin mengingatkan, bahwa keberhasilan Danantara membutuhkan waktu dan tidak bisa instan.

Amin membeberkan, dengan road map seperti itu, BUMN di China tahun 2023 lalu menyumbang pendapatan operasional sebesar US\$12,11 triliun.

"Jumlah itu setara dengan sekitar 68% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut, dan mempekerjakan sekitar 56,12 juta tenaga kerja, atau sekitar 7,65% dari total angkatan kerja nasional," tutup Amin.

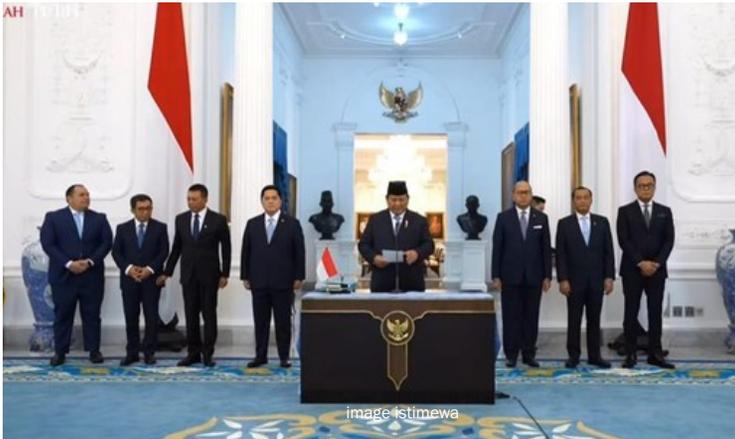


image Istimewa

“Saya mendorong pengelola Danantara untuk selalu bersikap profesional, menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, dan terbuka kepada publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan Danantara bisa menjadi contoh holding BUMN yang berintegritas,”



image istimewa

Anggota FPKS Hendry Munief Harap Pemerintah Optimalisasi Sektor UMKM Saat Ramadhan

Jakarta (27/02) — Di tengah gencarnya kebijakan presiden untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi membuat berbagai kalangan meminta jajaran presiden

untuk memanfaatkan setiap momentum. Salah satunya adalah bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

Salah satunya disuarakan oleh anggota DPR RI dari Fraksi

“Seperti pastikan stabilisasi harga bahan baku industri rumahan, rantai pasok yang cukup, saluran distribusi dan transportasi antar daerah saat arus mudik. Jika ada jaminan ketersediaan bahan baku, harga bahan baku yang terjangkau maka pelaku UMKM terbantu dan otomatis harga jual tidak tinggi. Semua terbantu baik pelaku UMKM dan konsumennya.”

H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau I

PKS, Hendry Munief saat dihubungi pada Rabu (24/2/2025) malam. Dia meminta pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk pertumbuhan ekonomi

“Beberapa hari lagi Ramadhan akan datang. Dimana umumnya bulan puasa ini konsumsi akan naik. Kita berharap pemerintah memanfaatkannya untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Hendry Munief.

Dia menambahkan pada beberapa hari besar nasional aktifitas ekonomi selalu meningkat. Seperti Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri. Hal itu khususnya yang berperan adalah sektor UMKM. Pelaku UMKM akan menikmati momen ini.

Dia berharap untuk

menstimulasi hal itu, pemerintah memanfaatkan potensi UMKM sebagai sektor yang paling berperan saat Ramadhan nantinya. Ada beberapa langkah yang menurutnya dapat dilakukan.

“Seperti pastikan stabilisasi harga bahan baku industri rumahan, rantai pasok yang cukup, saluran distribusi dan transportasi antar daerah saat arus mudik. Jika ada jaminan ketersediaan bahan baku, harga bahan baku yang terjangkau maka pelaku UMKM terbantu dan otomatis harga jual tidak tinggi. Semua terbantu baik pelaku UMKM dan konsumennya.” kata ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.



image istimewa

PKS Usul Spesifikasi Pesawat Diatur di RUU Haji dan Umrah

Jakarta (01/03) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur soal spesifikasi pesawat dan maskapai penerbangan.

“Selain istitha'ah kesehatan, penting juga istitha'ah penerbangan Pak. Mestinya betul-betul ada seleksi dan atau kualifikasi yang rigid gitu ya,” kata HNW dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Kemenag, Kemenhub, Kemenkes dan

spesifikasi ini penting untuk diatur secara rinci untuk memastikan seluruh jemaah mendapat fasilitas yang sama dan terjamin baik untuk keberangkatan maupun kepulangan. Sehingga dipastikan bahwa pesawat pesawat yang nanti akan mengangkat jemaah haji itu betul-betul yang memenuhi kualifikasi,”

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Kemenlu, Senin (24/2).

HNW menilai spesifikasi ini penting untuk diatur secara rinci untuk memastikan seluruh jemaah mendapat fasilitas yang sama dan terjamin baik untuk keberangkatan maupun kepulangan.

“Sehingga dipastikan bahwa pesawat pesawat yang nanti akan mengangkat jemaah haji itu betul-betul yang memenuhi kualifikasi,” katanya.

Dengan adanya aturan tersebut dalam RUU Haji dan Umrah, maka pemerintah dan DPR bisa menghemat waktu dan tenaga daripada harus melakukan perdebatan mengenai jenis pesawat yang akan digunakan untuk penerbangan haji setiap tahunnya.

“Maksud kami dalam konteks pembuatan UU, bagaimana ini ada daya ikatnya. Sehingga nanti tidak asal membuat ketentuan, tapi memang ada undang-undangnya. Inilah kesempatan kita untuk mengatur Pak,” tuturnya.

Komisi VIII DPR RI tengah menggodok RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Saat ini Panitia Kerja RUU Haji dan Umrah tengah rutin melakukan rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak.

RUU Haji dan Umrah sendiri masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025.

Kunjungan ke Embarkasi
Sukolilo Surabaya,

Aleg PKS Fikri Faqih Soroti Perbaikan Layanan Haji 2025

Surabaya (28/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih Bersama pimpinan dan rombongan Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya, pada Rabu (26/02/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan embarkasi terbesar di Indonesia ini dalam menyambut musim haji 2025.

Pria yang akrab disapa Fikri ini menyoroti pentingnya Embarkasi Sukolilo sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Agama, berbeda dengan embarkasi di Batam dan Jawa Tengah yang berada di bawah naungan pemerintah provinsi.

Dia menekankan perlunya antisipasi terhadap berbagai dinamika dan problematika yang mungkin dihadapi jemaah haji pada tahun 2025.

"Embarkasi Sukolilo ini sangat penting, sebagai embarkasi dengan jemaah haji

terbesar di Indonesia. Banyak dinamika dan problematika yang harus kita antisipasi untuk ini jemaah haji tahun 2025," kata legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, dalam keterangannya, Kamis (27/02/2025).

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah potensi kepadatan jemaah atau 'overload'.

Fikri mengungkapkan bahwa petugas embarkasi merasa kewalahan dengan sistem 5 kloter per hari yang diterapkan pada tahun 2024. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar jumlah kloter dikurangi menjadi 4 per hari.

"Petugas di sini, kalau se-

perti tahun 2024 dengan 5 kloter setiap hari, mereka sangat kelelahan. Mereka meminta supaya menjadi 4 kloter," tandas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.

Perubahan ini, menurut Fikri, memerlukan koordinasi yang baik dengan maskapai penerbangan terkait pengaturan jadwal keberangkatan ke Arab Saudi.

Dia mendesak agar pihak-pihak terkait segera diajak berdiskusi untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, Fikri juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas dan penanganan masalah jemaah haji yang hilang.

Fikri menyoroti banyaknya pintu keluar yang tidak terkontrol dengan baik sebagai salah satu faktor penyebab jemaah teresat.

"Banyak keluhan dari daerah, terutama dari Madura, terkait hal-hal teknis. Misalnya, penggunaan toilet di pesawat. Ini harus diajarkan dan dipraktikkan agar tidak ada masalah di kemudian hari," kata Fikri.

Fikri menegaskan pentingnya normalisasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Di tengah dinamika efisiensi anggaran, ia berpendapat dengan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.



"Embarkasi Sukolilo ini sangat penting, sebagai embarkasi dengan jemaah haji terbesar di Indonesia. Banyak dinamika dan problematika yang harus kita antisipasi untuk jemaah haji tahun 2025,"

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Di tengah dinamika efisiensi anggaran, kita sepatok dengan pesan Pak Presiden ba-

hwa pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus lebih baik," pungkasnya.



Kunker ke Malang, Alifudin: Kita Pastikan Pangan Masyarakat Aman selama Ramadan

Malang (02/03) --- Dalam rangka memastikan kualitas dan keamanan pangan menjelang bulan suci Ramadan, Alifudin, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Malang pada Kamis, 27 Februari 2025.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Komisi IX untuk mengawasi kondisi pangan di seluruh Indonesia, terutama menjelang bulan Ramadan yang biasanya meningkatkan permintaan akan kebutuhan pangan.

Pada kesempatan ini, Alifudin menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pangan yang akan dikonsumsi masyarakat, khususnya dalam memastikan produk pangan tersebut aman dan tidak membahayakan kesehatan.

"Keamanan pangan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Apalagi menjelang Ramadan, di mana permintaan pangan akan

meningkat pesat. Kita harus memastikan bahwa pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan yang ditetapkan," ujar Alifudin.

Alifudin juga mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi pangan.

"Masyarakat harus teliti dalam memilih produk pangan, baik itu bahan makanan segar maupun produk olahan. Perhatikan label dan tanggal kedaluwarsa, serta pastikan produk tersebut bebas dari bahan berbahaya seperti formalin dan boraks," tegasnya.

Alifudin juga mengingatkan agar

masyarakat tidak mudah tergo-da oleh pangan yang terlihat menggugah selera, namun belum tentu aman untuk dikonsumsi.

Kunjungan ini juga dimaksudkan untuk mengingatkan para pelaku usaha pangan di Kota Malang agar senantiasa mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Alifudin mengingatkan bahwa kualitas pangan yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

"Pangan yang aman adalah investasi bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi daerah, kita harus pastikan masyarakat terjaga kesehatannya," tambahnya.

Sebagai bagian dari tugasnya di Komisi IX DPR RI, Alifudin menyatakan bahwa pengawasan terhadap keamanan pangan tidak hanya dilakukan melalui kunjungan seperti ini, tetapi juga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang sedang dan akan terus diperjuangkan oleh Komisi IX DPR RI.

Alifudin menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan regulasi yang lebih ketat dalam pengawasan pangan demi melindungi masyarakat dari potensi risiko pangan yang tidak aman.

Pada akhir kunjungan, Alifudin berjanji akan terus me-



"Masyarakat harus teliti dalam memilih produk pangan, baik itu bahan makanan segar maupun produk olahan. Perhatikan label dan tanggal kedaluwarsa, serta pastikan produk tersebut bebas dari bahan berbahaya seperti formalin dan boraks."

H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

ndorong peningkatan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam memahami pentingnya keamanan pangan.

"Saya berharap, melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kita bisa memastikan semua

pangan yang beredar di pasar aman dan layak konsumsi. Komisi IX DPR RI akan terus mengawal agar perlindungan terhadap pangan masyarakat dapat terjaga dengan baik," tutup Alifudin.

Jelang Ramadhan, Aleg PKS Kurniasih Dorong BPOM Pastikan Keamanan dan Sosialisasi Pangan Sehat

Jakarta (22/02) — Menyambut bulan suci Ramadhan 1446 H/2025 M, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi.

Selain itu, ia juga meminta BPOM untuk aktif melakukan sosialisasi tentang bahan pangan yang sehat dan aman, baik kepada pedagang maupun konsumen.

Kurniasih menekankan bahwa meningkatnya permintaan terhadap bahan pangan selama Ramadhan harus diiringi dengan kepastian bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

Menurutnya, hal ini penting

agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir terhadap risiko pangan yang tidak layak konsumsi.

"Kami mendorong BPOM untuk memastikan bahan pangan yang beredar aman dikonsumsi, baik produk kemasan maupun pangan segar. Selain itu, sosialisasi kepada pedagang dan konsumen sangat penting agar semua pihak memahami pentingnya pangan sehat dan tidak tergoda mengguna-

kan bahan berbahaya demi keuntungan sesaat," ujar Kurniasih di Jakarta, dalam keterangannya, Sabtu (22/02).

Ia juga mendorong agar BPOM mengencangkan edukasi kepada masyarakat tentang cara memilih pangan yang aman, termasuk memperhatikan izin edar, komposisi bahan, serta cara penyimpanan yang benar. Dengan informasi yang memadai, diharapkan konsumen dapat lebih selektif dalam berbelanja dan pedagang semakin sadar akan pentingnya menyediakan pangan yang aman.

"Saat Ramadhan, makanan dan minuman yang dijual di pasar dan pusat jajanan meningkat jumlahnya. BPOM perlu turun langsung untuk memberikan edukasi kepada pedagang tentang cara menyajikan pangan yang higienis dan bebas dari bahan berbahaya. Jika pedagang dan konsumen sama-sama paham, maka kita bisa mencegah peredaran pangan yang berisiko bagi kesehatan," tambahnya.

Lebih lanjut, Kurniasih mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih pangan yang dikonsumsi selama Ramadhan. Ia juga mengapresiasi langkah BPOM dalam melakukan sosialisasi, tetapi menegaskan bahwa jangkauan edukasi harus diperluas, termasuk melalui media sosial dan kerja sama dengan komunitas pedagang serta organisasi masyarakat.



"Komisi IX DPR RI akan terus mendukung upaya BPOM dalam menjamin keamanan pangan di Indonesia, terutama di momen-momen penting seperti Ramadhan. Dengan pangan yang aman dan berkualitas, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan sehat,"

**Dr. Hj. KURNIASIH
MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Komisi IX DPR RI akan terus mendukung upaya BPOM dalam menjamin keamanan pangan di Indonesia, terutama di momen-momen penting se-

perti Ramadhan. Dengan pangan yang aman dan berkualitas, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan sehat," pungkasnya.

Komisi IX FPKS Minta Kemnaker Percepat Regulasi Pelindungan Pekerja Berbasis Aplikasi

Jakarta (25/02) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI agar segera menyelesaikan regulasi komprehensif terkait pelindungan pekerja berbasis aplikasi seperti driver ojek online dan kurir.

"Saat ini, status pekerja berbasis aplikasi masih belum jelas. Mereka bukan karyawan tetap dan tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan perusahaan platform digital. Akibatnya, hak-hak dasar mereka sering kali terabaikan," ujar Netty dalam keterangannya, Selasa, (25/02).

Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi terjadinya eksploitasi dan ketidakpastian status kerja serta minimnya jaminan sosial bagi pekerja di sektor ekonomi digital.

"Sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai pekerja formal, sehingga tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan seperti upah layak, perlindungan kesehatan, dan jaminan sosial," tambahnya.

Selain itu, kata Netty, perubahan kebijakan platform yang sering dilakukan secara sepihak, termasuk pemotongan insentif, membuat mereka semakin terhimpit secara ekonomi.

"Harus ada mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencegah pemutusan akses

kerja secara sepihak oleh platform digital. Pengaturan jam kerja yang manusiawi guna menghindari eksploitasi tenaga kerja juga harus menjadi pembahasan," terangnya.

Lebih lanjut, Netty juga menekankan pentingnya regulasi sebagai landasan bagi aplikator agar memberikan perhatian kepada pekerja menjelang hari raya.

"Meskipun tidak selalu disebut THR, apapun bentuk bantuan jelang hari raya tentu akan menjadi apresiasi berarti bagi para pekerja online seperti ojek, kurir, dan lainnya. Mereka telah bekerja keras sepanjang tahun untuk menopang layanan digital yang kita gunakan setiap hari," jelasnya.

Menurut Netty, negara harus hadir guna memastikan kesejahteraan dan keadilan pada mereka.

"Teknologi aplikasi telah memberi banyak kemudahan pada masyarakat dan pengusaha. Tentunya para pekerja yang terlibat di dalamnya pun harus merasakan kesejahteraan dan kenyamanan. Jangan sampai mereka hanya melihat orang menikmati kemudahan teknologi, sementara kehidupannya sendiri terpuruk," katanya.



"Teknologi aplikasi telah memberi banyak kemudahan pada masyarakat dan pengusaha. Tentunya para pekerja yang terlibat di dalamnya pun harus merasakan kesejahteraan dan kenyamanan. Jangan sampai mereka hanya melihat orang menikmati kemudahan teknologi, sementara kehidupannya sendiri terpuruk,

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokrakj Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



Perpustakaan Nasional Dikunjungi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman

Jakarta (25/02) — Wakil Ketua Komisi X DPR-RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada salah satu mitra Komisi X DPR-RI, yakni Perpustakaan Nasional yang berada di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Pada kunjungan ini, Mahfudz Abdurrahman diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Prof. Aminudin Aziz

Kunjungan diawali dengan sambutan oleh kepala Perpustakaan Nasional beserta jajaran, dilanjutkan dengan laporan singkat dari kepala Perpustakaan Nasional terkait program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat, perbaikan kualitas perpustakaan, serta upaya meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Agenda dilanjutkan dengan dialog tukar pikiran dalam rangka membahas dukungan

Komisi X kepada Perpustakaan Nasional RI sebagai salah satu mitra kerja dengan Komisi X, dan diakhiri dengan meninjau beberapa lantai di gedung Perpustakaan Nasional RI.

Salah satu poin penting pembahasan antara lain adalah mengenai dampak dari efisiensi yang dilakukan diberbagai lembaga negara.

“Dampak efisiensi anggaran sangat berpengaruh di Perpustakaan Nasional ini, tapi kami tidak mengurangi pelayanan perpustakaan. Seperti: listrik, ac, dan air tetap menyala 1 gedung serta tidak mengurangi jam dan hari kunjungan,

agar masyarakat tetap dapat merasakan pelayanan pengunjung di Perpustakaan Nasional”. Ucap Prof. E. Aminudin Aziz - Kepala Perpustakaan Nasional.

Selain itu, daya tarik perpustakaan juga perlu diperhatikan agar masyarakat semakin tertarik mengunjungi perpustakaan.

“Perpustakaan perlu menjadi menarik, agar anak muda maupun pengunjung yang lain tertarik ke Perpustakaan Nasional. Sehingga mereka nyaman menggunakan fasilitas disini, betah membaca, dan untuk selalu berkunjung ke Perpustakaan Nasional RI,” ujar Mahfudz Abdurrahman - Wakil Ketua Komisi X.

Selain itu, Mahfudz Abdurrahman - Wakil Ketua Komisi X DPR RI juga mengatakan pihaknya sangat passionate terhadap seni budaya.

“Menurut saya kita harus bisa menciptakan dan membuat ruang untuk komunitas atau masyarakat lainnya dapat mengadakan kegiatan di Perpustakaan Nasional. Seperti, teater, dan lainnya. Agar dapat meramaikan dan mengenalkan budaya Indonesia.”

“Saya sangat senang bisa berkunjung ke Perpustakaan Nasional, diharapkan PERPUSNAS dapat terus bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat. Karenakan sesuai target kita 2045 menyongsong (Indonesia Emas),” tutup Mahfudz.



“Saya sangat senang bisa berkunjung ke Perpustakaan Nasional, diharapkan PERPUSNAS dapat terus bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat. Karenakan sesuai target kita 2045 menyongsong (Indonesia Emas),”

**H. MAHFUZZ
ABDURRAHMAN, S.Sos**
Wakil Ketua Komisi X DPR RI





image istimewa

Presiden Prabowo Resmikan Danantar

**Aleg PKS Kholid: Bismillah..
Semoga Bisa Melipatgandakan
Investasi di Indonesia!**

Jakarta (25/02) --- Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025.

Lembaga ini diharapkan menjadi pilar utama dalam pengelolaan investasi strategis di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan target pengelolaan aset lebih dari 900 miliar dollar AS. Sementara itu, pendanaan awalnya ditargetkan mencapai 20 miliar dollar AS.

Menanggapi peluncuran ini, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyatakan harapannya agar BPI Danantara dapat berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing investasi Indonesia.

"Kami menyambut baik peluncuran BPI Danantara sebagai inisiatif strategis dalam mengoptimalkan investasi negara. Dengan tiga pilar utama 'sovereign wealth fund', development investment, dan asset management—kami berharap Danantara dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang berdampak besar bagi perekonomian nasional," ujar Kholid yang merupakan Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat Kota Depok dan Kota Bekasi.

Sebagai Anggota Komisi XI Keuangan dan Perbankan, Kholid menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan investasi negara.

"Keberhasilan BPI Danantara akan sangat bergantung pada governance yang baik, mitigasi risiko investasi, serta koordinasi yang erat antara pemerintah, DPR, dan sektor swasta. Kami akan menjalankan fungsi pengawasan agar Danantara bisa bekerja secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut, Kholid yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu juga menyoroti perbedaan fundamental antara BPI Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) yang didirikan pada era Presiden Joko Widodo.

"BPI Danantara memiliki cakupan lebih luas dibandingkan INA. Selain berperan sebagai sovereign wealth fund, Danantara juga berfungsi sebagai investment development dan asset management. Ini membe-

Presiden Prabowo Resmikan Danantara, Aleg PKS Kholid: Bismillah.. Semoga Bisa Melipatgandakan Investasi di Indonesia!

« SEBELUMNYA

rikan fleksibilitas lebih dalam strategi investasi,” jelasnya.

Meski demikian, Kholid berpandangan bahwa nantinya pengelolaan Danantara harus mengambil pelajaran dari success story berbagai sovereign wealth fund (SWF) top dunia, seperti China Investment Corporation (CIC) di Tiongkok, Temasek Holdings di Singapura, Norway Government Pension Fund Global di Norwegia, Abu Dhabi Investment Authority, dan Qatar Investment Authority.

“Model SWF di negara-

negara tersebut telah terbukti mampu memberikan keuntungan jangka panjang serta berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi Danantara untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara tersebut guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas investasinya.” sambung Kholid.

Di sisi lain, ada catatan dan lesson learned yang dapat kita ambil dari contoh kegagalan dalam tata kelola atau governance SWF seperti yang terjadi pada skandal korupsi

1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia. Kasus tersebut merugikan Malaysia senilai 4,5 miliar dollar AS (setara dengan Rp 69 triliun).

Kholid berharap bahwa keberadaan BPI Danantara dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8% dalam lima tahun ke depan.

“Kami akan terus mengawal implementasi BPI Danantara agar sejalan dengan kepentingan nasional dan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.



image istimewa



“Keberhasilan BPI Danantara akan sangat bergantung pada governance yang baik, mitigasi risiko investasi, serta koordinasi yang erat antara pemerintah, DPR, dan sektor swasta. Kami akan menjalankan fungsi pengawasan agar Danantara bisa bekerja secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia,”

**H. MUHAMMAD
KHOLID, S.E., M.Si.**

Anggota Komisi XI DPR RI



Jelang Ramadan, Muh Haris: Pastikan Stok Energi Aman, Warga Nyaman Beribadah dan Mudik

Salatiga (26/02) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menegaskan pentingnya kesiapan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Haris menyoroti berbagai langkah strategis yang telah disiapkan guna menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.

“Kami di Komisi XII DPR RI terus mengawal agar pasokan BBM, LPG, dan listrik tetap terjaga dengan baik, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khushyuk serta melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman,” ujar Haris.

Menurut laporan Kementerian ESDM, kondisi stok energi nasional secara umum berada dalam keadaan aman. Stok BBM dipastikan

cukup dengan ketahanan hingga 18-20 hari, sementara LPG memiliki coverage days 15,2 hari. Selain itu, pasokan listrik nasional juga terjaga dengan cadangan daya sebesar 20.460 MW.

Muh Haris mengapresiasi langkah-langkah yang telah disiapkan oleh pemerintah, diantaranya Pembentukan Tim Posko Nasional Sektor ESDM, Peningkatan stok BBM dan LPG, Penyediaan layanan tambahan BBM, Keandalan pasokan listrik, dan Monitoring ketat aktivitas vulkanik dan mitigasi bencana geologi, mengingat adanya 3 gunung api berstatus Siaga dan 22 gunung api

berstatus Waspada.

Namun, Muh Haris juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah. Ia meminta agar distribusi energi lebih merata, khususnya untuk wilayah terpencil dan daerah kepulauan yang sering mengalami kendala pasokan selama periode libur panjang.

“Kami mendorong agar distribusi energi diperkuat hingga ke pelosok, karena ketersediaan di tingkat nasional tidak akan berdampak jika distribusi di lapangan tersendat,” tegasnya.

Selain itu, Haris juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi yang kerap meningkat menjelang hari raya. Ia meminta Pertamina dan BPH Migas untuk lebih aktif dalam monitoring distribusi BBM bersubsidi, sehingga tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menutup keterangannya, Haris memastikan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kesiapan sektor ESDM menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia bisa beribadah dan merayakan Idul Fitri dengan tenang. Kami di DPR akan terus mengawasi, memastikan energi cukup, distribusi lancar, dan harga tetap stabil,” pungkasnya.



“Kami di Komisi XII DPR RI terus mengawal agar pasokan BBM, LPG, dan listrik tetap terjaga dengan baik, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khushyuk serta melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.
Anggota Komisi XII DPR RI



H. JALAL ABDUL NASIR, AK

Soal Pertamina Oplosan, Haji Jalal: Tak Ada Celah bagi Pengoplosan BBM, Perlu Transparansi

Jakarta (26/02) --- Menyusul klarifikasi Pertamina terkait isu dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, kembali menyampaikan informasi dari Pertamina bahwa secara operasional, tidak ada proses yang memungkinkan peningkatan RON 90 menjadi RON 92 di terminal-terminal BBM.

"Informasi dari Pertamina salah satu cara menaikkan RON adalah dengan octane booster, dan seluruh terminal Pertamina tidak memiliki atau menyediakan material tersebut. Ia menjelaskan bahwa baik Pertamax maupun Pertalite yang diimpor mayoritas datang dalam kondisi tanpa warna (jernih), kemudian pewarnaannya dilakukan di terminal dengan penambahan dyes—biru untuk Pertamax—sebagai langkah efisiensi perusahaan," ungkapnya.

Selain itu, untuk Pertamax, imbuhnya, terminal juga melakukan injeksi Gasoline Performance Additive (GPA) guna meningkatkan kualitas bahan bakar sebagai nilai tambah bagi konsumen.

"Dengan kondisi ini, saya perlu memastikan bahwa tidak ada proses yang memungkinkan RON 90 (Pertalite) dinaikkan menjadi RON 92 (Pertamax) di fasilitas distribusi Pertamina," tegas Haji Jalal.

an pengawasan, mulai tahun 2025, pengujian oleh Lemigas akan dilakukan secara berkala—baik bulanan maupun triwulanan—sesuai dengan kelas terminalnya, meskipun tidak ada jadwal pemeriksaan resmi dari pemerintah.

Meski demikian, Haji Jalal tetap mengingatkan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam distribusi BBM agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

"Kita harus memastikan tidak ada celah bagi praktik kecurangan di lapangan. Pengawasan yang lebih ketat dan audit independen tetap diperlukan agar masyarakat mendapatkan BBM sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan," pungkasnya.

Haji Jalal pun menambahkan kualitas BBM yang telah dilakukan secara ketat.

"Produk yang disalurkan selalu diperiksa oleh Lemigas untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi migas, dan alhamdulillah hasilnya selalu on spec," jelasnya.

Sebagai bentuk peningkatan

"Kita harus memastikan tidak ada celah bagi praktik kecurangan di lapangan. Pengawasan yang lebih ketat dan audit independen tetap diperlukan agar masyarakat mendapatkan BBM sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan,"

H. JALAL ABDUL NASIR, AK.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII



image istimewa

Komisi XII FPKS Meitri Citra Wardani : Lemahnya Pengawasan Picu Korupsi di Pertamina

Jakarta (27/02) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Meitri Citra Wardani mengaku prihatin atas dugaan korupsi yang mendera Pertamina Patra Niaga serta anak perusahaan Pertamina lainnya.

Meitri menilai skandal ini menyingkap bagaimana rapuhnya manajemen perusahaan tersebut sehingga dapat disusupi oleh oknum pihak swasta yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan celah regulasi dan pengawasan yang lemah.

“Saya melihat peraturan yang ada, dalam hal ini Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri memiliki spirit yang positif. Namun demikian, aturan ini menjadi kurang bertaji sepanjang tidak dibarengi dengan praktik pengawasan yang kuat oleh Kementerian ESDM dalam memastikan pengelolaan sektor energi berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur. Lemahnya praktik pengawasan ini akhirnya membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyusup dan merusak sistem bisnis Pertamina sehingga berakibat pada kerugian negara,” jelas Meitri, Kamis (27/02/2025). Meitri menambahkan,

lemahnya pengawasan secara tidak langsung berkontribusi terhadap moral hazard yang menjangkiti sejumlah oknum petinggi perseroan karena menciptakan lingkungan dimana mereka merasa aman untuk melakukan tindakan tidak etis atau ilegal.

“Mekanisme kontrol dan pengawasan internal dan eksternal yang tidak berjalan dengan optimal membuat mereka yang memiliki niat tidak baik bisa dengan mudah melakukan manipulasi data, mengatur tender, dan terpengaruh oleh bujuk rayu oknum di luar perusahaan. Untuk itu, sistem pengawasan perlu dibenahi agar lebih kuat, pengambilan keputusan penting di perseroan harus berbasis transparansi dan akuntabilitas, serta penerapan sanksi berat oleh perusahaan harus dilakukan agar menimbulkan efek jera sekaligus pembelajaran bagi yang lain,” jelas Meitri.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga mengingatkan agar Pertamina lebih hati-hati dalam menjalin kerjasama dengan

Komisi XII FPKS Meitri Citra Wardani : Lemahnya Pengawasan Picu Korupsi di Pertamina

« SEBELUMNYA

pihak swasta. Menurutny perseroan perlu meninjau kembali sejumlah kontrak kerjasama dengan pihak swasta untuk memastikan bisnis yang berjalan sesuai dengan peraturan.

“Ke depan, Pertamina harus lebih selektif dan berhati-hati dalam menjalin kerja sama agar praktik serupa tidak terulang. Langkah ini bukan

untuk mempersulit, tetapi guna memastikan bahwa setiap mitra bisnis memiliki komitmen dan keseriusan dalam menjalankan tata kelola yang baik dan bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku,” terangnya.

Lebih lanjut, Meitri menekankan terungkapnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata

kelola niaga. Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi.

“Reformasi ini bukan sekadar perbaikan internal. Lebih jauh, yaitu sebagai upaya memastikan pengelolaan sumber daya energi nasional berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan amanat konstitusi sehingga manfaatnya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik dalam bentuk harga energi yang lebih terjangkau maupun peningkatan layanan kepada mereka,” ujarnya

Meitri juga memuji kinerja pemerintahan Prabowo karena berhasil membongkar praktik korupsi yang merugikan keuangan negara hingga nyaris menyentuh Rp 200 triliun. Dia menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum yang adil dan profesional.

“Skandal ini terjadi pada rentang 2018-2023 dan berhasil terbongkar pada saat ini. Dengan demikian, terungkapnya kasus ini di era pemerintahan Prabowo adalah bukti keseriusannya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berani, dan tidak mengenal kompromi terhadap tindakan yang merugikan keuangan negara. Untuk itu, proses hukum yang berjalan harus mampu memberikan efek jera bagi para pelaku yang terlibat dan peringatan bagi yang lain,” terangnya.



image istimewa



Sistem pengawasan perlu dibenahi agar lebih kuat, pengambilan keputusan penting di perseroan harus berbasis transparansi dan akuntabilitas, serta penerapan sanksi berat oleh perusahaan harus dilakukan agar menimbulkan efek jera sekaligus pembelajaran bagi yang lain,”

**Hj. MEITRI CITRA
WARDANI, S.H.**

Anggota Komisi XI DPR RI



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



Bertemu Dirjen Keimigrasian,

Sohibul Iman Pentingnya Pemeliharaan Pemanfaatan Fasilitas dan Program Pimpasa

Jakarta (21/02) — Sejumlah Anggota Komisi XIII DPR-RI melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis(20/02/2025).

Kunjungan diawali dengan rapat dengar pendapat bersama seluruh kepala kantor wilayah kantor keimigrasian se-provinsi Jawa Barat. Diwakili oleh Kakanwil, pihak Dirjen Kanwil memberikan pemaparan terkait kondisi dan situasi yang tengah berjalan serta program yang sedang mereka jalankan dan rencanakan dalam lingkup provinsi dan masing-masing kantor wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XIII Fraksi PKS Sohibul Iman menyoroti be-berapa hal, termasuk diantaranya adalah mengenai digitalisasi yang digaungkan oleh pihak keimigrasian.

Sohibul Iman menyampaikan bahwa ada hal terkait fasilitas yang belum sebaik dengan apa yang digaungkan selama ini

"Satu hal yang menjadi kebiasaan kita bangsa Indonesia menurut saya, menyediakan sesuatu yang baru itu kita sangat mampu, tetapi me-maintain dan membuat itu berkesinambungan ini menjadi problem besar. Misal dalam konteks paspor, aplikasi M- Paspor. Saya kebetulan menggunakan aplikasi M-Paspor. Dari pengalaman saya

ini, saya melihat belum seindah seperti apa yang digembar-gemborkan".

Sohibul Iman menambahkan, bahwa perlu adanya keseriusan dalam pemeliharaan dan keberlanjutan atas fasilitas yang sudah dibangun untuk dijaga dan terus dikembangkan. Agar apa-apa yang sudah dibangun, bisa berjalan lebih baik bersamaan juga dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak keimigrasian.

"Hambatannya cukup lumayan. Karena itu menurut saya kembali, sudah membangun, maintenance-nya ini perlu diperhatikan, sehingga apa yang sudah kita investasikan tidak mubazir, bahkan tadi bisa menopang keinginan untuk meningkatkan pelayanan imigrasi lebih baik".

Kemudian Sohibul Iman sampaikan rasa bahagiannya pada salah satu program yang dimiliki oleh pihak Keimigrasian, yaitu Pimpasa (Petugas Imigrasi Pembina Desa), sebuah program yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan ancam-

Bertemu Dirjen Keimigrasian, Sohibul Iman Pentingnya Pemeliharaan Pemanfaatan Fasilitas dan Program Pimpasa

« SEBELUMNYA

an bahaya dari hal-hal seperti TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan semacamnya.

"Kemarin bersama pak Menteri (pada saat Raker), saya senang sekali dengan adanya Pimpasa ini, Petugas Imigrasi Pembina Desa, tentu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena memang saya pernah terpilih di 2009 di Dapil Jakarta II, Jakarta dan luar negeri. Itu setiap saya kunjungan, terutama Malaysia memang persoalannya sangat luar biasa disana. Artinya ada daerah-daerah tertentu di Indonesia ini jadi

korban-korban TPPO dan TPPN".

Sohibul Iman lalu meminta pihak Keimigrasian, khususnya kanwil provinsi Jawa Barat roadmap dalam upaya menekan angka TPPO menjadi ke angka nol. Tentu tujuannya agar apa yang selama ini terjadi kepada masyarakat Indonesia tidak terjadi lagi ke depannya.

"Kalau tujuannya seperti itu, saya ingin mendapatkan gambaran dari Dirjen dan khususnya kanwil di Jawa Barat, kira-kira roadmap untuk kepada zero TPPO dan TPPN itu seperti apa, dan keterlibatan masyarakat seperti apa", imbuh Sohibul Iman sebagai penutupnya.



"Kemarin bersama pak Menteri (pada saat Raker), saya senang sekali dengan adanya Pimpasa ini, Petugas Imigrasi Pembina Desa, tentu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena memang saya pernah terpilih di 2009 di Dapil Jakarta II, Jakarta dan luar negeri. Itu setiap saya kunjungan, terutama Malaysia memang persoalannya sangat luar biasa disana. Artinya ada daerah-daerah tertentu di Indonesia ini jadi korban-korban TPPO dan TPPN".

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, M.Eng., Ph.D.

Anggota Komisi XIII DPR RI



image istimewa

Kunker ke UPT Pemasarakatan Kalteng,

Aleg PKS Meity Rahmatia: Tata Kelola Lapas Harus Lebih Baik!

Palangkaraya (27/02) — Setelah ke Lembaga Pemasarakatan (Lapas) di Pulau Nusakambangan beberapa hari lalu, kini giliran Lapas di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dikunjungi Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia.

Politik Partai Keadilan Sejahtera tersebut, tiba di Kota Palangkaraya pada Rabu (26/2/2025), la bersama sejumlah rekannya di Komisi Tiga Belas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menjalankan fungsinya, kunjungan spesifik dan dengar pendapat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kalteng.

Dalam rapat dengan pendapat di Kanwil Ditjenpas Kalteng, Meity turut menyampaikan pandangannya terhadap sistem pengelolaan Lapas dan Rutan di tanah air.

Menurutnya, kualitas pengelolaan Lapas secara umum mengalami perbaikan. Namun kondisi itu, kata Meity, harus ditingkatkan lagi, baik dari aspek keamanan, pelayanan, pembinaan, dan lain-lain.

"Berbagai catatan buruk tentang tata kelola Lapas, sudah diungkap berkali-kali di media. Dan sejauh ini, saya melihat ada upaya perbaikan yang sedang dilakukan kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Mudah-mudahan berlangsung lebih cepat dengan dukungan Ditjenpas, kepala Lapas dan kepala Rutan. Lapas harus lebih baik!," harapnya dalam dengar pendapat bersama pihak terkait di Kawil Ditjenpas Kalimantan Tengah.

Dalam kunjungan di Kalimantan Tengah, Meity yang terbangun bersama rombongan Komisi XIII DPR RI mengapresiasi Ditjenpas Kalteng dan UPT pemasarakatan se-Kalimantan Tengah yang menindaklanjuti kasus pemerasan dalam Lapas.

Komisi XIII DPR RI juga mendesak, tiap penyelenggara pemasarakatan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tetap berdasarkan pada undang-undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Sesuai SOP dan peraturan lainnya dalam melakukan pelayanan, pembinaan, bimbingan masyarakat, perawatan dan pengamanan di Lapas dan Rutan.

Komisi XIII DPR RI mendukung dirjen pemasarakatan dan kanwil direktorat jenderal pemasarakatan melakukan pengawasan dan pemantauan kepada semua UPT pemasarakatan di Kalimantan Tengah.

"Tujuannya untuk mencegah dan menindak peredaran narkoba dan transaksi pengutan liar, peras pemeras, jual beli kamar tahanan di lapas dan pengangkatan jabatan yang tidak sesuai pemasarakatan dan prosedur," ungkapnya.

Komisi XIII DPR RI juga meminta seluruh kanwil dan seluruh Kalapas, Karutan agar transparan dalam panganan setiap persoalan.

"Tetap menjaga marwah dan instusi lembaga masyarakat



"Berbagai catatan buruk tentang tata kelola Lapas, sudah diungkap berkali-kali di media. Dan sejauh ini, saya melihat ada upaya perbaikan yang sedang dilakukan kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Mudah-mudahan berlangsung lebih cepat dengan dukungan Ditjenpas, kepala Lapas dan kepala Rutan. Lapas harus lebih baik!,"

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Komisi XIII DPR RI

yang tetap solid dan profesional. Tunduk dan patuh kepada pimpinan direktorat jenderal pemasarakatan kementerian Imigrasi," tegas Meity.

Terakhir, Komisi XIII DPR RI meminta kepada semua petugas

as lapas/rutan dan warga binaan di Indonesia untuk dilakukan test urin dalam mencegah dan menindak peredaran dan mengkonsumsi narkoba di lapas atau rutan.



image istimewa

Soal Danantara, Habib Idrus: Solusi Strategis bagi Perekonomian Indonesia

Jakarta (25/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Idrus Salim menanggapi kebijakan Pemerintah yang telah mengambil langkah strategis dengan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara),

sebuah sovereign wealth fund (SWF) yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan nasional, mengoptimalkan aset negara, dan menarik lebih banyak investasi.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Idrus, langkah

"Sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya melihat Danantara sebagai bagian dari strategi pertahanan ekonomi nasional. Dana ini harus dikelola secara profesional dan dapat digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Selain itu, pengelolaan aset BUMN di bawah Danantara harus dilakukan secara efisien agar menghasilkan manfaat optimal bagi negara," tegas Habibnya Tangerang ini

yang diambil Pemerintah patut diapresiasi, karena merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

"Jika kita melihat negara lain, SWF telah menjadi instrumen penting dalam mengelola investasi negara. Norwegia memiliki Government Pension Fund Global dengan aset lebih dari \$1,6 triliun, sementara China memiliki China Investment Corporation (\$1,35 triliun) dan SAFE Investment Company (\$1,09 triliun). Negara-negara Timur Tengah seperti Abu Dhabi, Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar juga memiliki dana investasi yang mengelola aset ratusan miliar dolar," terang Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Danantara, imbuh Habib

Idrus, dirancang untuk menjadi pemain besar di arena global. Dengan proyeksi pengelolaan aset mencapai \$982 miliar atau sekitar Rp15,547 triliun dalam beberapa tahun ke depan, Danantara berpotensi masuk ke dalam jajaran 10 SWF terbesar di dunia.

"Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan Indonesia memiliki daya saing di tingkat internasional. Keuntungan Danantara bagi Indonesia adalah bisa menjadi solusi pembiayaan Nasional. Dengan Danantara, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dan memiliki sumber pendanaan alternatif yang lebih mandiri dan berkelanjutan," tegas Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

BERIKUTNYA >>>

Soal Danantara, Habib Idrus: Solusi Strategis bagi Perekonomian Indonesia

« SEBELUMNYA

DPR RI ini.

Habib Idrus menambahkan Danantara akan menarik investor global ke sektor strategis seperti infrastruktur, teknologi, dan energi hijau, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Optimalisasi Aset Negara

Dengan pengelolaan yang lebih profesional, aset negara yang sebelumnya kurang produktif bisa dimaksimalkan untuk memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian," ujarnya.

Selain itu, lanjut Habib Idrus, dampak positif bagi masyarakat yakni bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan investasi yang tepat, industri akan tumbuh, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan

"Optimalisasi Aset Negara Dengan pengelolaan yang lebih profesional, aset negara yang sebelumnya kurang produktif bisa dimaksimalkan untuk memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian," ujarnya.

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Danantara dapat mendukung akses pembiayaan bagi UMKM sehingga mereka lebih kompetitif dan berkembang.

Pemerataan Infrastruktur

Investasi Danantara berpotensi mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah," ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini.

Transparansi dan Akuntabilitas, kata Habib Idrus, harus dipastikan bahwa pengelolaan Danantara dilakukan secara transparan dan bebas dari intervensi politik.

"Disamping itu Manajemen Risiko yang Bijaksana juga harus dimiliki. Investasi harus berbasis pada analisis yang mata-

ng agar memberikan keuntungan jangka panjang dan terhindar dari kerugian besar," urainya.

Danantara, tambah Habib Idrus, juga harus fokus pada investasi yang mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan menciptakan dampak nyata bagi rakyat Indonesia.

"Sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya melihat Danantara sebagai bagian dari strategi pertahanan ekonomi nasional. Dana ini harus dikelola secara profesional dan dapat digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Selain itu, pengelolaan aset BUMN di bawah Danantara harus dilakukan secara efisien agar menghasilkan manfaat optimal bagi negara," tegas Habibnya Tangerang ini

Danantara, imbuhnya, adalah langkah besar yang patut diapresiasi dan merupakan solusi strategis bagi Indonesia dalam mengelola investasi nasional.

"Dengan tata kelola yang baik, Danantara bisa menjadi instrumen utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pembangunan yang lebih merata. DPR RI akan terus mengawasi implementasi Danantara agar benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dan memastikan bahwa Danantara ini menjadi kebanggaan nasional," tutup Habib Idrus.



"Dengan tata kelola yang baik, Danantara bisa menjadi instrumen utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pembangunan yang lebih merata. DPR RI akan terus mengawasi implementasi Danantara agar benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dan memastikan bahwa Danantara ini menjadi kebanggaan nasional,"

**HABIB IDRUS SALIM
ALJUFRI, Lc., M.B.A.**
Anggota Komisi I DPR RI



image istimewa

75 Tahun Indonesia-Rusia: Parlemen Rusia Ajak DPR Gabung BRICS Parliamentary Forum

Moskow (27/02) — Parlemen Rusia mengajak DPR RI bergabung dalam wadah perkumpulan Parlemen BRICS atau BRICS+ Parliamentary Forum seiring dengan bergabungnya Indonesia ke kelompok informal BRICS baru-baru ini.

Ajakan ini disampaikan oleh Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia saat menerima jajaran Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Mardani Ali Sera yang mengunjungi Dewan Federal, di Moskow, Russia, Senin(24/02/2025).

"Dewan Federasi menyambut baik kehadiran Indonesia dalam berbagai forum dialog baik di ASEAN dan sekarang dalam format BRICS. Saya mengucapkan selamat 75 tahun Indonesia - Russia. Kami menganggap Indonesia sebagai mitra bersahabat dengan kerja sama yang baik," sambut Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia, Senator Grigory Karasin.

Ketua Delegasi BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menyambut baik ajakan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesegera mungkin. Ia melihat ke depan terbuka peluang kolaborasi lebih dalam antara Indonesia-Rusia dan dengan BRICS.

"BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik," kesan Mardani.

Pada kesempatan tersebut, BKSAP juga mengundang Dewan Federasi untuk berkunjung ke Indonesia, memperkuat kontak antarparlemen dan merayakan 75 tahun Indonesia - Rusia.

"Kami juga mendorong kontak dan frekuensi saling kunjung meningkat, seiring dengan telah dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral di DPR RI untuk Rusia," tambah Mardani.

Grigory Farasin pada kesempatan tersebut menggarisbawahi hubungan kedua negara baik dalam konteks bilateral dan dalam kerangka BRICS akan dapat mendorong pertumbuhan kawasan Global South dan Global East secara lebih baik dan membantu perwujudan dunia yang lebih adil dalam realita yang multipolar saat ini.

"Kami juga menunggu kehadiran Presiden Prabowo ke Rusia baik pada Mei nanti untuk acara peringatan Kemenangan Perang Dunia ke-II dan Juli untuk hadir dalam St Petersburg Economic Forum,"

75 Tahun Indonesia-Rusia : Parlemen Rusia Ajak DPR Gabung BRICS Parliamentary Forum

« SEBELUMNYA

harap Grigory.

Selain ajakan BRICS Parliamentary Forum, Dewan Federasi juga mengusulkan pembentukan grup geopolitik baru di Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi parlemen global. Grup geopolitik yang akan disebut BRICS+ itu bersifat terbuka bagi parlemen yang menjadi anggota blok BRICS dan yang akan bergabung ke blok dimaksud.

Dewan Federasi juga mengharapkan peningkatan kerja sama Indonesia-Rusia ke

depan dan menggarisbawahi segera rampungnya negosiasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia - Eurasian Economic Union (EAEU).

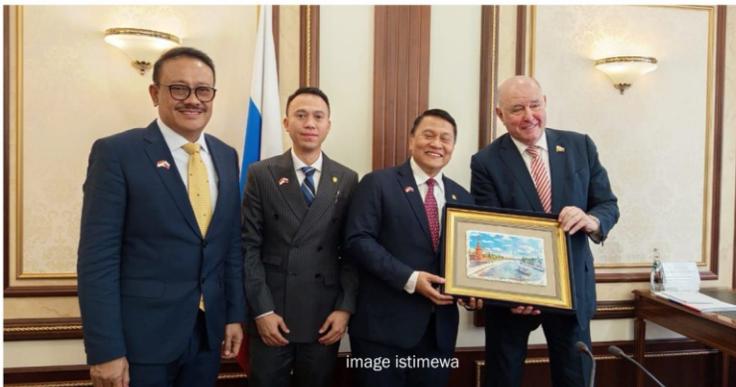
Sementara BKSAP menyampaikan perlunya Dewan Federal mendorong finalisasi keputusan investasi kilang minyak di Tuban yang akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

"Sekaligus kami mendorong penguatan kapasitas Bahasa antarstaf parlemen kedua negara. Sehingga staf parlemen Indonesia dapat belajar Bahasa Russia dan sebaliknya."

pesannya.

BKSAP DPR RI melakukan lawatan kehormatan ke Moskow 22-27 Februari, sebagai bagian dari upaya memperkuat interaksi antarpemerintah dalam 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia - Russia pada 2025 ini.

Delegasi terdiri dari Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (FPKS), Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh (F Partai Gerindra), dan Gde Sumarjaya Linggih (FPG) bertemu dan berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan Indonesia - Rusia yakni BRICS Expert Council, Dewan Federasi Majelis Federal, Duma Negara Majelis Federal, Kelompok Persahabatan Rusia - Indonesia Duma Negara Majelis Federal.



"BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik,"

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Ketua Badan Koordinasi Antar Parlemen DPR RI



Catat Yuk! Jadual Libur Sekolah di Ramadan 2025

Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Bersama
untuk Pembelajaran Semasa Ramadan



PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri



Momen ramadan bisa menjadi kesempatan emas untuk **meningkatkan prestasi belajar** melalui kegiatan yang terarah di sekolah. Lomba keagamaan, diskusi nilai-nilai Ramadan, atau kajian keislaman dapat menjadi bagian dari kurikulum yang memperkuat iman sekaligus menjaga semangat belajar.

Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A
Anggota DPR RI



PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri

DPR RI | Grafis: Heri



Tanggal Libur
27 Februari
s/d
5 Maret
Kegiatan belajar mandiri
dilingkungan keluarga, tempat ibadah,
atau masyarakat

26 Maret
s/d
8 April
Libur Idulfitri

*Aturan diteken
Mendikdasmen, Menag,
dan Mendagri



PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri

Sumber: itjen.kemdikbud.go.id | Grafis: Heri



image istimewa

Sosialisasi Empat Pilar, Ledia Hanifa Ingatkan Pentingnya Pahami Implementasi UU dalam Kehidupan

Bandung (28/02) — Anggota MPR RI sekaligus DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menggelar Sosialisasi Empat Pilar di hadapan para mahasiswa dari berbagai kampus di Aula Kampus ASM Ariyanti Kota Bandung, pada Rabu (26/02/2025) lalu.

Mengawali paparannya, Ledia menjelaskan jika bentuk negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau kita kenal dengan singkatan NKRI.

"Bentuk negara ini tertantum dalam Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Bentuk negara ini dipilih sebagai bagian dari amanat konstitusi, bukan seperti negara lain yang bentuknya federasi dengan negara-negara bagiannya. Sedangkan ayat 2-nya menjelaskan tentang: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," jelas Ledia

Salah satu ciri dari negara kesatuan adalah kekuasaan pemerintahan utama berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh dalam mengatur kebijakan nasional dan regional. Pemerintah daerah hanya menjalankan otonomi yang didelegasikan oleh pusat.

"Contohnya, kewenangan dalam mengatur SMA/SMK, adanya di pemerintah provinsi,

kewenangan dalam mengatur jenjang SD hingga SMP adanya di pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta adanya di pemerintah pusat," lanjut Ledia mencontohkan.

Berkaitan dengan pendidikan, Ledia menyinggung Pasal 31 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi 'Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang'.

"Terkait pendidikan, Pemerintah sedang berupaya untuk memberikan regulasi yang lebih baik. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas yang lama, wajib belajar masih 9 tahun. Sedangkan rata-rata anak sekolah di Indonesia sampai kelas 2 SMP, berarti belum tuntas 9 tahun. Kalau untuk Kota Bandung dan Cimahi sudah lebih dari 10

Sosialisasi Empat Pilar, Ledia Hanifa Ingatkan Pentingnya Pahami Implementasi UU dalam Kehidupan

« SEBELUMNYA

tahun, tapi belum sampai 12 tahun. Nah saat ini kita sedang mendorong agar wajib belajar itu bisa sampai 13 tahun, dimulai dari PAUD sam-pai SMA," ungkap Ledia yang juga Anggota DPR RI Komisi X.

Selain menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan UUD NRI Tahun 1945

sebagai konstitusi negara. Ledia Hanifa juga menjelaskan jika empat pilar MPR RI juga terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

"Mahasiswa juga bisa terlibat aktif dalam menyampaikan nilai-nilai empat pilar MPR RI ini kepada masyarakat luas, bisa dengan cara membuat dialog interaktif dengan masyarakat,

maupun menyampaikan melalui media sosial. Tentu dengan beragam kemasn yang menarik dan tetap berpedoman pada regulasi yang sudah ada," kata Ledia.

Kepada para peserta yang sekarang sedang duduk di bangku kuliah, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini mengingatkan agar mereka banyak bersyukur karena telah menjadi bagian dari sedikit anak-anak Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan hingga kuliah. Salah satu bentuk syukur itu bisa dilakukan dengan menjalani kuliah dengan bertanggung jawab, serius, aktif dalam kegiatan positif dan berusaha agar bisa mendapat nilai terbaik.

Di akhir paparan, Ledia juga mengingatkan pada para mahasiswa yang hadir terkait pentingnya belajar dan memahami undang-undang yang ada di Indonesia.

"Misalnya mahasiswa jurusan Teknik Pangan, perlu juga mengetahui tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi juga perlu mempelajari Undang-Undang ITE, agar apa yang disampaikan tidak bertentangan dengan hukum, begitu juga mahasiswa jurusan-jurusan lainnya perlu untuk mengetahui dan mempelajari undang-undang serta nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal bermasyarakat dan berbangsa dalam keseharian," pungkasnya.



image istimewa

“Mahasiswa juga bisa terlibat aktif dalam menyampaikan nilai-nilai empat pilar MPR RI ini kepada masyarakat luas, bisa dengan cara membuat dialog interaktif dengan masyarakat, maupun menyampaikan melalui media sosial. Tentu dengan beragam kemasn yang menarik dan tetap berpedoman pada regulasi yang sudah ada,”

Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI



Survei ARCI: Reni Astuti Melesat di Hati Warga, Bukti Kerja Nyata di Dapil Jatim 1

Surabaya (26/02) — Nama politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Reni Astuti, mencuat dalam survei terbaru terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1

yang meliputi Surabaya – Sidoarjo. Hasil survei dirilis oleh lembaga Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) yang digelar di Surabaya.

Direktur Eksekutif ARCI Baihaki Sirajt mengatakan bahwa survei kepuasan ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat Surabaya –Sidoarjo terhadap kerja Anggota DPR RI.

“Nama Politisi PKS, Reni Astuti, terekam dan disebut oleh responden saat kami sodorkan pertanyaan mengenai nama-nama anggota DPR RI 2024-2029. Nama Reni Astuti urutan nomor 3, setelah Lucy Kurniasari dan Bambang Haryo Soekartono (BHS),” ujar Baihaki Sirajt saat rilis hasil surveinya di Surabaya, Rabu (26/2/2025).

Baihaki mengungkapkan, Reni Astuti mendapat apresiasi tinggi, dengan 8,7 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kerjanya sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Jatim 1, meskipun masih berada dibawah Lucy Kurniasari dan BHS.

“Secara rinci, responden merasa puas terhadap kinerja

DPR RI yaitu BHS 15,2 persen mendapatkan urutan pertama, disusul Lucy Kurniasari 9,2 persen, Reny Astuti 8,7 persen, Lita Mahfud Arifin 7,8 persen, Adies Kadir 4,5 persen, Indah Kurnia 3,3 persen, Arzeti 2,5 persen, Arizal Tomliwafa 2,3 persen, dan Ahmad Dhani 1,9 persen,” ungkapnya.

“Dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1000 Responden maring of error 3,8% dengan tingkat kepercayaan 95% dan bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat merasakan dampak positif dari kinerja Anggota DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah,” tutur Baihaki.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Reni Astuti mengungkapkan keterkejutannya atas adanya survei yang menilai kinerja anggota DPR RI. Menurutnya, survei semacam itu biasanya dilakukan untuk mengevaluasi 100 hari kerja Presiden saja.

“Saya tidak menangka

Survei ARCI : Reni Astuti Melesat di Hati Warga, Bukti Kerja Nyata di Dapil Jatim 1

« SEBELUMNYA

ada survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja anggota DPR RI, karena biasanya survei semacam ini hanya dilakukan untuk menilai 100 hari kerja Presiden,” ujar Reni saat dihubungi wartawan Akurat Media News melalui chat WhatsApp.

Meski demikian, Reni bersyukur karena hasil survei menunjukkan dirinya masuk dalam tiga besar. Ia pun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat, khususnya warga

Surabaya dan Sidoarjo.

“Jika hasil survei menyatakan saya masuk tiga besar, tentu saya mengucapkan Alhamdulillah. Semoga hasil ini memang mencerminkan fakta di masyarakat. Saya juga berterima kasih kepada warga Surabaya dan Sidoarjo atas kepercayaan yang diberikan,” ungkap Reni dengan nada penuh syukur.

Lebih lanjut, Reni menegaskan bahwa keberadaannya di DPR RI bukan sekadar soal survei. Sejak dilantik pada 1 Oktober 2024, ia terus berupa-

ya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, baik melalui rapat di Komisi V maupun Badan Legislatif, serta turun langsung ke daerah pemilihannya tanpa menunggu masa reses.

“Saya selalu berusaha untuk tetap menyapa warga di kampung-kampung sebagaimana tugas saya di DPR RI. Saya juga perlu memastikan bahwa program nasional benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di daerah pemilihan saya,” tegas Reni.

“Meskipun sudah menjadi anggota DPR RI, saya tetap harus turun ke bawah. Bagi saya, wakil rakyat tidak boleh berjarak dengan rakyatnya. Mohon doa agar saya bisa terus istiqomah dalam menjalankan amanah ini,” pungkasnya.



“Jika hasil survei menyatakan saya masuk tiga besar, tentu saya mengucapkan Alhamdulillah. Semoga hasil ini memang mencerminkan fakta di masyarakat. Saya juga berterima kasih kepada warga Surabaya dan Sidoarjo atas kepercayaan yang diberikan,”

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur I



Sosialisasi Empat Pilar di Makassar, Meity Rahmatia: Rasa Cinta NKRI Kokoh dengan Nilai Agama dan Budaya

Makassar (25/02) — Anggota DPR yang juga MPR RI, Meity Rahmatia kembali menggelar sosialisasi empat pilar di Kota Makassar, Senin (24/2/2024).

Kegiatan resmi yang diemban sebagai anggota parlemen di Senayan Jakarta ini dihadiri warga dan tokoh masyarakat setempat.

Di kesempatan ini, Meity yang terpilih dari daerah pemilihan I Sulawesi Selatan; Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar pada pemilihan legislatif 2024, meneguhkan kembali relasi negara, agama dan budaya.

Menurutnya, nilai-nilai agama dan budaya Bugis-Makassar adalah potret empat pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Empat pilar menyerap nilai-nilai agama, khususnya Islam yang mengajarkan Ketuhanan yang Esa dan rasa cinta tanah air. Begitu juga budaya masyarakat di nusantara. Termasuk budaya masyarakat Bugis-Makassar yang menjunjung tinggi kesetiaan, cinta, rasa hormat, keberanian, empati, idealisme, dan lain-lain," terangnya yang juga dikenal sebagai aktivis sosial tersebut.

Empat pilar mencakup Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi cita-cita besar dan tujuan berdirinya NKRI.

Pancasila yang terdiri dari 5 sila, NKRI itu sendiri dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah sosial masyarakat Indonesia yang beragama.

Meity memaparkan empat pilar ini selama satu jam lamanya di hadapan peserta dengan gaya bicaranya yang lugas. Diakhir bahasannya, ia kembali mengajak mencintai NKRI.

"Saya mengajak semuanya. Mari kita berperan aktif menyokong pembangunan. Terutama dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti pada sektor usaha kecil dan menengah," pintanya.

Politisi yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses tersebut menilai, empat pilar tidak cukup dipahami saja. Tetapi juga harus direalisasikan dalam tindakan nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui ekonomi.

"Sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan. Generasi muda kita butuh pekerjaan supaya tidak kabur aja dulu semuanya. Saya kira, poin ini juga sangat penting dalam meningkatkan rasa cinta kepada empat pilar," urainya menutup bahasannya di agenda ini.

"Sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan. Generasi muda kita butuh pekerjaan supaya tidak kabur aja dulu semuanya. Saya kira, poin ini juga sangat penting dalam meningkatkan rasa cinta kepada empat pilar,"

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Sulawesi Selatan I



Kunjungi Dusun Oli, Saadiah Uluputty Bantu Pembangunan Masjid Jelang Ramadhan

Ambon (25/02) -- Pembangunan masjid di Dusun Oli, Maluku, terus dikerjakan oleh masyarakat setempat menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1446 H.

Sebagai wujud kepedulian terhadap sarana ibadah, Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, turun langsung ke lokasi untuk memberikan dukungan kepada warga yang sedang bergotong royong membangun masjid.

Dalam kunjungan pada Ahad, 23 Februari 2025, Saadiah Uluputty yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, memberikan bantuan pribadi kepada panitia pembangunan masjid sebagai bentuk komitmennya dalam mendukung pengadaan tempat ibadah yang layak bagi masyarakat Maluku. "Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masjid agar dapat segera digunakan saat bulan Ramadhan tiba," ungkap Saadiah.

Saadiah, yang dikenal sebagai aktivis perempuan dari Indonesia Timur, dengan penuh

perhatian mendengarkan aspirasi warga dan berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut.

"Masyarakat di Dusun Oli memiliki semangat gotong royong yang luar biasa dalam membangun masjid ini. Saya menyambut baik harapan mereka dan akan berupaya membantu pengadaan beberapa fasilitas agar masjid ini bisa segera digunakan pada bulan Ramadhan," ujar Saadiah Uluputty yang merupakan politisi PKS ini.

Kehadiran Saadiah disambut hangat oleh warga yang mengapresiasi kontribusinya dalam berbagai pembangunan infrastruktur keagamaan di Maluku.

Tidak hanya di Dusun Oli, selama ini ia telah aktif dalam mendukung pembangunan dan renovasi masjid di berbagai daerah, sebagai bagian dari perannya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah

pilihannya, Maluku.

Dengan semakin dekatnya bulan Ramadhan, Saadiah Uluputty menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tempat-tempat ibadah dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah.

"Saya berharap pembangunan masjid di Dusun Oli dapat segera rampung dan menjadi pusat ibadah yang bermanfaat bagi seluruh warga setempat," tutup Saadiah Uluputty.

Selama kunjungan, masyarakat Dusun Oli menyampaikan berbagai harapan terkait perنگkapan sarana dan prasarana masjid.

Mereka berharap adanya dukungan dalam pengadaan fasilitas seperti karpet, sound system, serta penerangan yang memadai agar aktivitas ibadah di bulan suci bisa berjalan dengan lebih khushuk dan nyaman.



"Masyarakat di Dusun Oli memiliki semangat gotong royong yang luar biasa dalam membangun masjid ini. Saya menyambut baik harapan mereka dan akan berupaya membantu pengadaan beberapa fasilitas agar masjid ini bisa segera digunakan pada bulan Ramadhan,"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Terima Audiensi Guru JSIT Jateng,

Fikri Faqih Siap Perjuangkan Hak Guru Swasta

Semarang (25/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menerima kunjungan dan audiensi perwakilan guru dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) wilayah Jawa Tengah di Semarang, Senin (24/02/2025).

Pertemuan ini menjadi wadah bagi para guru swasta yang tergabung di JSIT Jateng untuk menyampaikan aspirasi terkait pemenuhan hak-hak mereka, terutama isu krisis mengenai Inpassing.

"Kami bersilaturahmi dengan Bapak Dr Abdul Fikri Faqih untuk menyampaikan aspirasi para guru, khususnya perjuangan hak-hak guru, termasuk persoalan Inpassing," kata Sunarto, perwakilan JSIT Jateng.

Inpassing, sebagai upaya penyediaan profesi guru negeri dan swasta, menjadi salah satu fokus utama dalam audiensi ini.

Sebagai contoh, terkait inpassing antara guru swasta dan negeri seringkali rumit dan berbelit-belit. Hal ini berdampak

pada pengakuan profesionalisme dan kesetaraan hak.

Selain itu juga kesulitan dalam mengikuti dan mendapatkan sertifikasi guru, yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan.

Persoalan lain yang muncul adalah gaji guru swasta seringkali lebih rendah dibandingkan guru negeri dengan kualifikasi yang sama.

Para guru JSIT berharap agar aspirasi mereka dapat diuarakan di tingkat DPR RI melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait.

"Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat dari Beliau Bapak Dr Fikri dan

kesiapan beliau untuk bermitra untuk memajukan pendidikan," imbuh Sunarto, yang merupakan Sekretaris Bidang Organisasi dan Profesi JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah ini.

Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menyambut baik kedatangan perwakilan JSIT dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

"Alhamdulillah, saya menerima kunjungan dari JSIT yang mewakili berbagai daerah. Mereka menyampaikan aspirasi, dan meskipun saya tidak berada di Komisi X, kami tetap memiliki keterkaitan kerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, BNPB, dan banyak lagi yang berhubungan dengan dunia Pendidikan," kata pria yang akrab disapa Fikri ini.

Lebih lanjut, Fikri mengakui bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru di Indonesia, termasuk guru yang berada di bawah naungan mitra dari Komisi VIII DPR RI, yakni Kementerian Agama.

"Untuk mengurai berbagai persoalan itu, kami akan mengupayakan agar Direktur Jenderal (Dirjen) terkait, seperti Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan JSIT, agar persoalan-persoalan yang disampaikan tersebut bisa menemukan solusi," jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS).



"Untuk mengurai berbagai persoalan itu, kami akan mengupayakan agar Direktur Jenderal (Dirjen) terkait, seperti Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan JSIT, agar persoalan-persoalan yang disampaikan tersebut bisa menemukan solusi,"

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

Secara khusus, Fikri menilai dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Fikri mengedankan pentingnya peran pendidikan.

"Pendidikan adalah faktor vital bagi kemajuan bangsa. Ka-

mi akan berupaya menjembatani aspirasi ini dengan dirjen terkait," pungkas legislator dari daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Tengah (Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.



Hadiri Tarhib Ramadan, Nevi Zuairina Sampaikan Pentingnya Ramadan sebagai Pembinaan Karakter

Pasaman (24/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menghadiri acara Tarhib Ramadhan di SMPIT Cahaya Madani, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

Kegiatan ini menjadi sarana bagi para siswa dan masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadhan dengan penuh kesiapan, baik secara spiritual maupun sosial.

Dalam sambutannya, Nevi Zuairina menyampaikan pentingnya menjadikan Ramadhan sebagai bulan pembinaan karakter dan peningkatan kualitas diri.

Ia menekankan bahwa ibadah puasa tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kepedulian sosial.

"Ramadhan adalah bulan istimewa di mana kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, serta mempererat solidaritas sosial. Saya mengajak semua, terutama generasi muda, untuk menjadikan bulan ini sebagai momentum meningkatkan kedekatan dengan Al-Qur'an dan menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari," ujar politisi PKS ini.

Nevi yang kini duduk di Komisi XII DPR ini juga mengapresiasi SMPIT Cahaya Madani yang aktif dalam membangun lingkungan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan membina generasi muda agar tumbuh

dengan akhlak yang mulia.

Menurutnya, pendidikan yang berbasis nilai-nilai keislaman sangat penting untuk membentuk karakter generasi penerus yang berintegritas dan berkontribusi bagi masyarakat.

Selain memberikan motivasi kepada para siswa, Nevi Zuairina juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjalankan ibadah Ramadhan, termasuk dalam berbagi dengan sesama.

"Ramadhan adalah bulan berbagi. Mari kita tingkatkan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan

kan, sehingga keberkahan Ramadhan bisa dirasakan oleh semua," tambahnya.

Acara Tarhib Ramadhan diisi dengan tausiyah, doa bersama, serta kegiatan sosial yang melibatkan para siswa dan masyarakat sekitar.

Kehadiran Nevi Zuairina dalam acara ini mendapatkan sambutan hangat dari pihak sekolah, orang tua, serta para siswa yang antusias dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

"Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih siap menyambut dan mengisi Ramadhan dengan ibadah serta kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar", tutup Nevi Zuairina.

"Ramadhan adalah bulan istimewa di mana kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, serta mempererat solidaritas sosial. Saya mengajak semua, terutama generasi muda, untuk menjadikan bulan ini sebagai momentum meningkatkan kedekatan dengan Al-Qur'an dan menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II



Sohibul Iman Dukung dan Komitmen Ciptakan Sarjana dari Kabupaten Garut

Garut (22/02) -- Anggota Legislatif DPR RI Fraksi PKS, Sohibul Iman berkunjung ke desa Kramatwangi di Kabupaten Garut.

Dalam kunjungan ke dapilnya tersebut, Sohibul Iman berkesempatan untuk menyambangi tempat wisata kelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yakni Agrowisata Tepas Papandayan.

Sohibul Iman yang ditemani langsung oleh kepala desa yakni Bapak Rana, menggelar diskusi terkait berbagai hal, utamanya adalah soal pendidikan yang meliputi beasiswa dari pemerintah serta pengembangan agrowisata yang sudah berjalan.

Sohibul Iman menyampaikan rasa kagum terhadap anak-anak muda desa yang terlibat dalam pengelolaan agrowisata Tepas Papandayan.

"Nah ini Alhamdulillah, ada generasi muda kita yang semblan orang yang bergabung di klinik pertanian, ini saya betul-betul kagum betul".

Lebih lanjut, Sohibul Iman juga menyoroti terkait pengembangan agrowisata Tepas Papandayan ini agar bisa lebih berkembang, dengan semua sektor secara daya tariknya merata, sehingga tidak hanya pada satu sektor saja.

"Juga, karena ini disebut desa agrowisata, tentukan yang menjadi daya tarik bukan hanya pemandangan, tetapi bagaimana kita membuat pertanian di sini

juga menjadi daya tarik".

Lalu berdasarkan pengalamannya bermalam di Tepas Papandayan, Sohibul Iman menyatakan bahwa kualitas sebuah penginapan yang lebih baik, dapat ditentukan oleh kehadiran orang yang ahli di bidangnya. Hal ini bersinggungan dengan faktor pendidikan.

"Penginapan itu ada standarnya. Dari tempat tidurnya harus bagaimana, terus juga perlu ada fasilitas penunjang lainnya. Nah itu yang seperti itu butuh keahlian, harus ada orang yang sekolah dari secara

teknik, atau secara perhotelan."

Oleh karenanya, Sohibul Iman yang dalam pertemuan ini juga memberikan paparan terkait beasiswa-beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya dari pemerintah, mengatakan dirinya siap memperjuangkan masyarakat desa untuk mendapatkan beasiswa, dan juga mendukung serta berkomitmen untuk menciptakan sarjana dari Desa Kramatwangi.

"Untuk itu, InsyaAllah saya siap mendukung dan tentunya berkomitmen untuk menghadirkan sarjana-sarjana dari Desa Kramatwangi ini. Jadi nanti yang kuliah begitu sudah selesai pulang ke sini, mudah-mudahan sama-sama bisa membangun desa Kramatwangi ini", imbuh pria yang akrab disapa MSI ini.

"Untuk itu, InsyaAllah saya siap mendukung dan tentunya berkomitmen untuk menghadirkan sarjana-sarjana dari Desa Kramatwangi ini. Jadi nanti yang kuliah begitu sudah selesai pulang ke sini, mudah-mudahan sama-sama bisa membangun desa Kramatwangi ini",

**MOHAMAD SOHIBUL
IMAN, M.Eng., Ph.D.**

Anggota Komisi XIII DPR RI



image istimewa

Kunjungan di Trenggalek, Riyono DPR-RI Beri Pendidikan Politik dan Blusukan Silaturahmi

Trenggalek (26/02) — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Riyono turun ke Trenggalek, keperluannya untuk melangsungkan pendidikan politik kepada kader partai dan memberikan wawasan kebangsaan, Minggu (23/02/2025).

Dirinya berharap, kader partai menanamkan nilai-nilai kebangsaan utamanya adalah empat pilar.

Mulai dari Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga hal demikian dapat menjadi pedoman kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Riyono saat memberikan materi mengungkapkan puas, karena soal empat pilar kader PKS Trenggalek sudah hafal semua, hal itu dibuktikan dengan ngetes secara acak peserta yang hadir pada acara.

"Tadi saya ngetes pengurus tingkat kecamatan semua hafal pancasila. Inilah yang kita dorong. Karena, menjadi bagian penting kebangsaan agar kedepan masyarakat menanamkan jiwa nasionalis," jelasnya.

Selain itu, pria yang biasa disebut Riyono Capping mengungkapkan evaluasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang lalu, menurutnya Pemilu lalu cukup berat dengan kondisi masyarakat. Sehingga saat ini ada wacana Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

"Kemungkinan juga akan dibahas perubahan termasuk di sistem Pemilu terbuka atau tertutup, tetapi kecenderungannya akan tertutup, jadi jika tertutup maka yang akan beroperasi penuh adalah mesin partai," paparnya.

Melihat kondisi saat ini PKS, dia mengklaim kader cukup solid, karena pengurus hingga akar rumput di ranting, jika nanti sistem Pemilu akan tertutup maka ia mengatakan cukup siap.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Trenggalek, Komarudin mengucapkan terimakasih atas kunjungan DPR-RI Riyono, selain memang trenggalek bagian dari dipilnya juga merawat kader partai.

"Pematerinya ada dua pertama Pak Riyono sendiri dan Prof. Fazar Pramono dari Dosen Gontor, kedua orang hebat ini menambah pengetahuan untuk kader kami," ujarnya.

Komarudin menanggapi, terkait empat pilar kebangsaan menumbuhkan jiwa nasionalis



Kunjungan di Trenggalek, Riyono DPR-RI Beri Pendidikan Politik dan Blusukan Silaturahmi

« SEBELUMNYA

berjuang bela negara kuat sehingga kader memahami terkait demikian. “Kalau makan bergizi kita ngikut pusat kita setuju saja, dan itu sudah menjadi Presiden Prabowo dimana program waktu kampanye dan saat ini dilaksanakan,” tandasnya.

Tak hanya acara resmi

yang dikunjungi Riyono, Anggota Komisi IV yang membidangi Kelautan, Kehutanan, Pertanian itu melakukan kunjungan ke rumah teman. Saat disugahi durian khas trenggalek Riyono cukup menikmati potensi lokal tersebut.

“Ya ini acara santai saja dan kami disugahi durian khas trenggalek,ebetulan saya di Komisi yang membidangi itu,

tadi juga ada obrolan kolaborasi untuk mengembangkan potensi trenggalek ini,” ujarnya.

Sementara itu, Cahyo Handriadi yang cukup kenal dekat dengan Riyono mengucapkan terimakasih atas kunjungannya dan dia berharap benar-benar mengawal aspirasi rakyat di Trenggalek.

“Dengan melihat trenggalek mayoritas warnanya jadi petani dan nelayan serta hutan cukup luas, semoga bisa mengawal aspirasi-aspirasi mereka, dan ada kolaborasi yang berkesinambungan,” tandasnya.



image istimewa



“Tadi saya ngetes pengurus tingkat kecamatan semua hafal Pancasila. Inilah yang kita dorong. Karena, menjadi bagian penting kebangsaan agar kedepan masyarakat menanamkan jiwa nasionalis

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur VII



image istimewa

Sosialisasi Empat Pilar di Jombang, Meitri Tegaskan Jaminan Ketersediaan Energi Amanat Konstitusi!

Jombang (27/02) -- Anggota MPR RI Meitri Citra Wardani memaparkan usaha yang telah dilakukannya untuk mengawal ketersediaan energi bagi masyarakat, khususnya di tengah potensi meningkatnya permintaan jelang bulan Ramadan.

Hal itu disampaikannya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Hotel Cempaka Mas, Jombang, Jawa Timur, Selasa (25/2/2025).

Di hadapan para kepala dusun dan anggota PKS se-Jombang, Meitri menyampaikan agar mereka tidak perlu khawatir terkait dengan ketersediaan gas LPG 3 kg atau gas melon dan BBM selama Ramadan.

Hal itu menyusul sejumlah aspirasi yang dia terima dari konstituen yang mengungkapkan keresahannya terhadap isu terhambatnya pasokan energi.

"Komisi XII DPR telah bertemu dengan sejumlah mitra terkait, seperti Kementerian ESDM dan Pertamina, dan kami telah meminta mereka agar memastikan ketersediaan bahan bakar dan LPG yang menjadi kebutuhan utama masyarakat karena kami melihat hal itu sebagai amanat konstitusi, yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mereka pun menyatakan siap dan memastikan pasokan akan terpenuhi," ujar Meitri.

Adapun bunyi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar

1945 adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Minyak bumi dan gas adalah kekayaan alam yang pengelolaannya dilakukan oleh negara, dimana secara regulasi diatur oleh Kementerian ESDM sementara secara operasional oleh Pertamina, dan manfaatnya harus dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat," tambah Meitri.

Anggota Komisi XII DPR RI ini menyatakan bahwa pihaknya juga telah mengusulkan agar dilakukan reaktivasi Satuan Tugas untuk menjamin pasokan BBM terjaga.

Meitri menekankan pentingnya layanan tambahan dari Pertamina, seperti SPBU Siaga, mobil tangki siaga, motoris Pertamina, serta SPBU di titik-titik keramaian agar tetap terjaga pasokannya.

Selain itu, Meitri juga mendorong peningkatan pengawasan pasokan BBM di SPBU oleh BPH Migas dengan

Sosialisasi Empat Pilar di Jombang, Meitri Tegaskan Jaminan Ketersediaan Energi Amanat Konstitusi!

« SEBELUMNYA

menggandeng Pertamina dan Aparat Penegak Hukum (APH). Dia menegaskan perlunya deteksi dini terhadap potensi kendala distribusi guna menghindari permasalahan di kemudian hari.

“Deteksi dini dapat dilakukan melalui sidak bersama Aparat Penegak Hukum (APH) di

SPBU dengan tingkat permintaan tinggi misalnya. Selain memeriksa ketersediaan pasokan, kualitas dari bahan bakar yang didistribusikan ke masyarakat serta alat pengisian bahan bakar juga perlu dicek untuk memastikan sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Meitri juga menyoroti kelangkaan gas melon yang

sempat dikeluhkan masyarakat sejak awal Februari 2025.

Menurutnya, kebijakan Kementerian ESDM yang melarang penjualan LPG di warung atau pengecer sebenarnya bertujuan baik, yakni untuk mengembalikan harga gas melon sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai masyarakat terlalu mendadak.

“Alangkah baiknya jika dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, sambil memfasilitasi warung-warung pengecer agar bisa terdaftar resmi sebagai sub-pangkalan LPG sehingga bisa dimonitor harganya. Jika ini dilakukan secara paralel dan proaktif, saya yakin tidak akan timbul kegaduhan. Ini yang menjadi usulan kami kepada Kementerian ESDM dan Alhamdulillah berhasil direspons dengan positif,” paparnya.

Meitri pun mengungkapkan bahwa saat ini LPG 3 kg sudah kembali tersedia di tingkat pengecer, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses kebutuhan energi mereka.

“Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak ada lagi kendala dalam distribusi energi yang berdampak pada masyarakat luas, terlebih di saat bulan Ramadhan,” tutupnya.



image istimewa



“Minyak bumi dan gas adalah kekayaan alam yang pengelolaannya dilakukan oleh negara, dimana secara regulasi diatur oleh Kementerian ESDM sementara secara operasional oleh Pertamina, dan manfaatnya harus dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat,”

Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur VIII



Gelar Sosialisasi Pilar-pilar
Kebangsaan di Dapil

Muh Haris Tekankan Persatuan dan Cinta Tanah Air

Salatiga (26/02) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Joglo Pakuwon, Pemkot Salatiga, pada Selasa (25/2/2025).

Kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat Kota Salatiga dan sekitarnya ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta memperkuat rasa persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pemaparannya, Muh Haris menegaskan bahwa Empat Pilar MPR RI—yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat pilar ini, menurutnya, tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung dan memperkuat dalam membangun masyarakat

yang harmonis dan berdaulat.

"Kegiatan ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam menanamkan rasa cinta tanah air, memperluas wawasan kebangsaan, serta memperkuat integrasi bangsa. Kita harus bersama-sama mewariskan semangat kerja, kedisiplinan, dan persatuan kepada generasi penerus agar mereka menjadi agen perubahan yang membangun masa depan cerah bagi Indonesia," ujar Muh Haris.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

Menurutnya, sosialisasi ini juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang hadir.

Mereka mengapresiasi upaya Muh Haris dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai kebangsaan, khususnya dalam memperkuat kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman.

Sebagai Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah I, Muh Haris menegaskan komitmennya untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Empat Pilar Kebangsaan.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan guna memperkokoh semangat nasionalisme dan kebangsaan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.



Kita harus bersama-sama mewariskan semangat kerja, kedisiplinan, dan persatuan kepada generasi penerus agar mereka menjadi agen perubahan yang membangun masa depan cerah bagi Indonesia,"

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I





image istimewa

Kunjungi BPN Padang, Rahmat Saleh Minta Tingkatkan Transparansi

Padang (26/02) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan dalam setiap pengukuran tanah masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Kantor BPN Kota Padang, Senin (24/02/2025)

Menurut Rahmat, keterbukaan dan profesionalisme dalam pengukuran tanah sangat penting untuk mencegah konflik pertanahan di masyarakat.

“Saya mengingatkan seluruh pegawai BPN agar tetap menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan dalam setiap pengukuran tanah. Jangan sampai ada praktik yang merugikan masyarakat,”

H. RAHMAT SALEH, S.Farm., M.I.P

Anggota Komisi II DPR RI

“Saya mengingatkan seluruh pegawai BPN agar tetap menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan dalam setiap pengukuran tanah. Jangan sampai ada praktik yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Rahmat juga mendorong BPN untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah.

Dia menilai masih banyak warga yang belum memahami prosedur serta manfaat sertifikat tanah, sehingga sosialisasi harus terus ditingkatkan.

“Sertifikat tanah bukan hanya soal legalitas, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemilikinya. Oleh karena itu, literasi kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama,” katanya.

Selain itu, Rahmat menyoroti pentingnya pendekatan khusus dalam pengelolaan tanah ulayat di Sumatera Barat agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dia menekankan kebijakan pertanahan harus memperhatikan kearifan lokal, dan anggaran tahun 2025 harus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.

“Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan kondisi di lapangan,” tambahnya.

Sebagai contoh, Rahmat menyoroti persoalan administrasi pertanahan di Pantai Air Manis.

Dia menilai pengecekan langsung ke lokasi dan pemahaman historis tanah sangat penting untuk memastikan administrasi berjalan sesuai prosedur.

Rahmat menegaskan bahwa dirinya siap membantu masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah.

Dia juga menekankan bahwa penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti hukum yang kuat.



image istimewa

Sosialisasi Empat Pilar di Ponpes Nurul Amal, Surahman Ajak Santri Cintai NKRI dan Jaga Martabat Bangsa

Ciamis (27/02) --- Anggota Komisi III DPR RI sekaligus MPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat disambut hangat oleh pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amal, para santri, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan anggota DPRD Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

para santri, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan anggota DPRD Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

Kedatangan Surahman ke pesantren yang berada di Desa Bojongmenger Cimaragas, RT 004 RW 017, Cikawung, Bojongmenger, Cijeungjing, Karangmulyan, Kabupaten Ciamis

“Saya berharap santri mencintai negeri kita tercinta ini, turut serta menjaga jati diri, kehormatan, serta martabat bangsa serta memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia, karena santri merupakan generasi bangsa di masa depan,”

**Dr. KH. SURAHMAN
HIDAYAT, M.A.**

Anggota Komisi III DPR RI

untuk melakukan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika atau yang dikenal dengan Empat Pilar MPR RI.

Dalam sosialisasi, Surahman Hidayat mengucapkan terima kasih kepada ratusan santri, kiai, nyai, pimpinan, pengelola, pendidik serta anggota DPRD Kab. Ciamis yang telah menyambut dan antusias hadir memenuhi aula Pondok Pesantren Nurul Amal Ciamis untuk mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada Selasa, 25 Februari 2025.

“Silahuturrohim ini bukan yang pertama dan terakhir, pertemuan ini merupakan pertemuan yang spesial karena sosialisasi empat pilar MPR RI kali ini bertepatan dengan momen bahagia kita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan,” ujar Surahman.

Dalam sosialisasi, Surahman menyampaikan pentingnya Implementasi Empat

Pilar MPR RI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari.

Sosialisasi empat pilar MPR RI bertujuan untuk memberitahukan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar agar dapat diimplementasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya berharap santri mencintai negeri kita tercinta ini, turut serta menjaga jati diri, kehormatan, serta martabat bangsa serta memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia, karena santri merupakan generasi bangsa di masa depan,” kata Surahman.

Di akhir sosialisasi, Surahman juga menyampaikan bahwa ia yakin santri Pondok Pesantren Nurul Amal Ciamis merupakan salah satu generasi penerus bangsa yang patut untuk dibanggakan dan kelak akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa dari sana.

Sosialisasi Empat Pilar

Ahmad Heryawan Ajak Generasi Muda Wujudkan Cita-Cita Bangsa Indonesia

Bandung (03/03) — Dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Ruang Rapat Yayasan Kemurnian Hati Indonesia Kampung Pasir Impun Atas No. 1A, Desa Cikadut-Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa empat pilar kebangsaan yang perlu dipahami masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; UUD NKRI 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR; NKRI sebagai bentuk negara; Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. "Adapun alasan penting Keempat pilar MPR tersebut adalah untuk menjaga kemajemukan bangsa kita, sama halnya dengan mempertahankan dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

agar kondusifitas terus terjaga di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap Kang Aher ketika menyampaikan materi sosialisasi empat pilar dihadapan anggota Kepanduan dan PKS Muda Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Lebih lanjut, Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menegaskan bahwa khusus kepada generasi muda, dimana memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan bangsa dan menghadapi tantangan global.

"Pemuda adalah ujung tombak bangsa, oleh karena itu

dengan memahami dan mengamalkan Empat Pilar, kita dapat membangun Indonesia yang lebih kuat, berdaya saing, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan," ungkapnya.

"Generasi muda adalah harapan bangsa dan memiliki peran strategis dalam melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan Empat Pilar, kita dapat menjaga persatuan dan mencapai cita-cita nasional yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam ketertiban dunia," tegas Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Jawa Barat II ini berharap melalui sosialisasi ini dapat membuka wawasan tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman dan nilai-nilai kebangsaan semakin tertanam dalam diri generasi muda, sehingga dapat menjadi agen perubahan dan berkontribusi aktif dalam membangun bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik sesuai amanah Pembukaan UUD 1945.

"Dalam kesempatan sosialisasi empat pilar MPR ini, saya mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda daerah pemilihan saya Kota Bandung dan Kabupaten



"Pemuda adalah ujung tombak bangsa, oleh karena itu dengan memahami dan mengamalkan Empat Pilar, kita dapat membangun Indonesia yang lebih kuat, berdaya saing, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan,"

Dr. H. AHMAD HERYAWAN, Lc., M.Si.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Bandung Barat serta masyarakat Jawa Barat dan Indonesia untuk mendukung dan berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa

Indonesia sesuai amanah pembukaan UUD 1945," demikian disampaikan Kang Aher ini mengakhiri paparannya.

Saturday, March 8



International Women's Day 2025



9 ANGGOTA PARLEMEN PEREMPUAN FRAKSI PKS DPR RI

Saadiah Uluputty, S.T ● Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. ● Hj. Nevi Zuairina ● Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T ● Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. ● Reni Astuti, S.Si., M.PSDM.
● Hj. Meity Rahmatia, S.Pd., S.E., M.M. ● Hj. Meitri Citra Wardani, S.H.



Terima Aspirasi Wakil Bupati Buton

Fraksi PKS Siap Perjuangkan Akses Komunikasi Inklusif dan Potensi Alam Buton

Jakarta (24/2) — Fraksi PKS DPR RI menerima kunjungan aspirasi Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa di Ruang Rapat Bidang Legislasi Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Senin (24/2).

Aspirasi diterima oleh Ketua Bidang Aspirasi Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi I DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri serta Anggota Komisi VI DPR RI Ismail Bachtiar.

Dalam kunjungannya, Wakil Bupati Buton yang didampingi Asisten Daerah

(Asda) II Kabupaten Buton menyampaikan aspirasi terkait kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Buton.

“Buton ini adalah daerah induk dari berbagai pemekaran dan bercita-cita punya entitas sebagai provinsi sendiri. Kondisi sekarang Buton ini agak tertinggal meskipun kami punya potensi yang luar biasa, seperti lepas laut Buton, namun APBD hanya Rp800 miliar,” ujar Syarifudin.

Wakil Bupati yang baru dilantik tersebut juga menjelaskan saat ini di Kabupaten Buton masih terdapat 22 titik blank spot atau area yang belum terlayani oleh jaringan internet.

Habib Idrus menerima aspirasi dengan bahagia, Idrus menekankan senang melihat wakil bupati yang bersemangat meskipun baru dilantik. Ia juga

“Kami senang punya wakil bupati yang punya semangat luar biasa meskipun baru dilantik. Terkait 22 blank spot akan kita perjuangkan di Komisi I, nanti saya akan hubungi langsung menterinya,

**HABIB IDRUS SALIM
ALJUFRI, Lc., M.B.A.**
Anggota Komisi I DPR RI

menjelaskan akan memperjuangkan pembukaan akses internet di lokasi blank spot yang ada.

“Kami senang punya wakil bupati yang punya semangat luar biasa meskipun baru dilantik. Terkait 22 blank spot akan kita perjuangkan di Komisi I, nanti saya akan hubungi langsung menterinya,” ujar Idrus.

Sejalan dengan Habib Idrus, Ismail Bachtiar mendorong optimalisasi potensi sumber daya alam guna kemajuan Kabupaten Buton sekaligus menutup pertemuan aspirasi ini.

“Pak Wakil (Bupati) bisa optimalkan Perseroda/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk potensi aspal dan minyak tadi, supaya membawa manfaat untuk kita. Bisa disediakan data potensinya juga supaya nanti bisa kami bahas dengan mitra Komisi VI,” pungkas Ismail.



Terima Kunjungan Konstituen Rofik Hananto Dapil Jateng VII, Fraksi PKS Rumah Bersama untuk Sampaikan Aspirasi dan Harapan

Jakarta (21/02) -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima audiensi dari konstituen Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII, Rofik Hananto, di Ruang Pleno Fraksi PKS, Gd. Nusantara I, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/2).

Acara ini dihadiri oleh sekitar 70 peserta yang berasal dari wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, ketua rombongan mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari Fraksi PKS.

"Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Fraksi PKS yang telah menerima kunjungan kami dengan penuh kehangatan dan kekeluargaan," ujar Marcel selaku perwakilan rombongan.

Marcel juga menyampaikan bahwa kehadiran mereka dalam audiensi ini merupakan bentuk rasa syukur atas peningkatan dukungan masyarakat terhadap PKS di Purbalingga.

Anggota DPR RI, Rofik Hananto, dalam sambutannya menyambut baik kunjungan tersebut.

"Ahlan washalan, selamat datang di Fraksi PKS. Saya bangga dan bahagia atas kunjungan bapak dan ibu semua," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Fraksi PKS adalah rumah bagi seluruh anggota dan konstituen untuk menyampaikan aspirasi dan harapan.

"Fraksi PKS adalah rumah kita, tempat mencurahkan harapan dan cita-cita perjuangan kita semua," ucapnya.

Audiensi ini juga diisi dengan sesi diskusi, di mana peserta mengajukan beberapa pertanyaan terkait perbedaan antara DPR RI dengan DPRD tingkat I dan II, serta besaran gaji dan fasilitas yang diterima anggota DPR RI.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Rofik Hananto menjelaskan bahwa salah satu perbedaan mendasar antara DPR RI dan DPRD adalah dalam kewenangan anggaran.

"Anggaran belanja pembangunan memiliki perbedaan, di mana anggaran Sekretariat DPRD berada di bawah kewenangan kepala daerah," jelasnya.

Sedangkan terkait gaji dan fasilitas yang diterima anggota DPR RI, Rofik Hananto memberikan jawaban santai.

"Untuk masalah gaji dan fasilitas, bisa dicari di Google saja. Sekarang sudah canggih, tinggal tanya Mbah Google," ujarnya dengan senyum.

Audiensi ini ditutup dengan harapan agar komunikasi dan sinergi antara masyarakat dan Fraksi PKS terus terjalin erat demi memperjuangkan aspirasi rakyat.

Salah satu perbedaan mendasar antara DPR RI dan DPRD adalah dalam kewenangan anggaran. Anggaran belanja pembangunan memiliki perbedaan, di mana anggaran Sekretariat DPRD berada di bawah kewenangan kepala daerah,

H. ROFIK HANANTO, S.E
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII



Terima Kunjungan Edukasi
MA Attaqwa Bekasi,

Mahfudz Sampaikan Motivasi agar Berani Bermimpi

Jakarta (24/2) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, menerima kunjungan edukasi dari Madrasah Aliyah Attaqwa 04 Bekasi di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR, Senayan, pada Senin (24/02).

Kunjungan ini bertujuan menjadi sarana edukasi bagi pelajar untuk memperkenalkan mereka kepada lembaga DPR.

"Jazakallah kepada ustadz Mahfudz yang memperkenankan kami hadir dan menyambut langsung. Semoga program yang ada di Fraksi PKS bisa terus memberikan kenyamanan bagi umat," ujar Ida selaku Pimpinan MA Attaqwa.

Sementara itu, Mahfudz Abdurrahman mengungkapkan rasa bahagia dapat menerima kehadiran rombongan.

Ia menyampaikan harapan agar persaudaraan dan silaturahmi yang terjalin bisa berjalan terus dan kunjungan ini dapat

menjadi pemicu bagi para pelajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut juga menyampaikan bahwa posisinya saat ini sangat dekat dengan dunia pendidikan. Mahfudz menjelaskan terkait kehadiran berbagai program untuk kemajuan pendidikan, baik pelatihan untuk guru maupun program manfaat untuk pelajar.

Mahfudz juga mendorong para pelajar untuk menaruh cita-cita yang tinggi. Ia menyampaikan bahwa selama masih muda kita bisa jadi apa saja selama ada tiga hal, yaitu kemauan, kemampuan, kesempatan. Untuk mewujudkannya

kemudian perlu memiliki semangat dan motivasi yang tinggi.

"Alhamdulillah komisi saya sekarang sangat berhubungan dengan dunia pendidikan. Dengan demikian, kami di komisi X punya kepentingan untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia," ujar Mahfudz.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara Anggota DPR dengan para pelajar. Pelajar memberikan berbagai pertanyaan utamanya terkait program pendidikan dan kesehatan yang diperjuangkan oleh Fraksi PKS serta kemudian dijawab oleh Mahfudz.

"PKS sebagai fraksi tentu punya kebijakan yang diperjuangkan. Kita hadir di panggung politik memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan umat. Kita terdepan untuk urusan-urusan keumatan dan kerakyatan. Kami Komisi X berjuang agar ada kesetaraan antara sekolah dan madrasah untuk mendapat bantuan yang sama, termasuk akses kepada beasiswa. Untuk masalah kesehatan, kami Fraksi PKS punya wakil-wakil yang lantang di Komisi IX yang harapannya dapat memperluas akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu," pungkas Mahfudz.

Acara ditutup dengan sesi foto serta pemberian cinderamata dari Fraksi PKS DPR RI bagi MA Attaqwa 04 Kota Bekasi.



"PKS sebagai fraksi tentu punya kebijakan yang diperjuangkan. Kita hadir di panggung politik memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan umat. Kita terdepan untuk urusan-urusan keumatan dan kerakyatan. Kami Komisi X berjuang agar ada kesetaraan antara sekolah dan madrasah untuk mendapat bantuan yang sama, termasuk akses kepada beasiswa.

**H. MAHFUDZ
ABDURRAHMAN, S.Sos**
Wakil Ketua Komisi X DPR RI



image istimewa

Terima Audiensi Ponpes Nurhasanat Karawang, Fraksi PKS Dukung Fungsi Ponpes Pencetak SDM Berkualitas

Jakarta (21/02) --- Fraksi PKS DPR RI menerima audiensi dari pengurus dan santri Pondok Pesantren Nurhasanat Karawang yang merupakan konstituen dari Jalal Abdul Nasir, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII.

Audiensi berlangsung di Ruang Pleno Fraksi PKS ini dihadiri oleh 25 peserta dan bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta membuka wawasan para santri tentang peran politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ketua rombongan, Lili, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan bertemu dengan Fraksi PKS.

Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menguatkan hubungan antara pesantren dan PKS dalam kontribusi membangun bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi XIII dari Fraksi PKS I, Jalal Abdul Nasir menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

"Lembaga pendidikan pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak generasi bangsa yang berakhlak, cerdas, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional," ujarnya.

Ia juga mengingatkan

generasi muda untuk selalu produktif, memanfaatkan waktu dengan baik, dan menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat.

Dalam sesi diskusi, para santri mengajukan berbagai pertanyaan terkait motivasi belajar, wirausaha, strategi sukses sebagai wakil rakyat sekaligus kepala keluarga, serta bagaimana Fraksi PKS meyakinkan masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, mereka juga menanyakan sikap yang harus diambil terkait maraknya hashtag #Indonesiagelap dan #KaburAjaDulu di media sosial.

Pria yang akrab disapa Haji Jalal menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam dunia usaha.

"Di era ekonomi digital, santri harus memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk belajar dan berbisnis secara konsisten hingga sukses," katanya.

Ia juga berbagi pengalaman pribadi dalam mengelola usaha tanpa

BERIKUTNYA >>>



Terima Audiensi Ponpes Nurhasanat Karawang, Fraksi PKS Dukung Fungsi Ponpes Pencetak SDM Berkualitas

« SEBELUMNYA

mengganggu tugas sebagai anggota dewan.

“Saya sudah memiliki perusahaan yang kini dikelola istri dan karyawan, sehingga saya bisa fokus menjalankan amanah rakyat di DPR,” ungkapnya.

Terkait maraknya hashtag negatif tentang kondisi Indonesia, ia mengajak generasi muda untuk melihatnya sebagai bentuk kontrol sosial terhadap Pemerintah.

“Namun, kita harus tetap optimis bahwa Indonesia akan

baik-baik saja selama pemerintah menjalankan tugasnya dengan amanah dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tantangan ekonomi nasional dan langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

“Negara memiliki kewajiban membayar utang luar negeri yang besar, sementara kondisi ekonomi nasional sedang lesu. Oleh karena itu, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tak terhindarkan,” tambahnya.

Dalam hal penyaluran bantuan sosial, ia menegaskan

pentingnya validasi data penerima agar tepat sasaran.

“Saat ini, pemerintah tengah membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menjadi satu data induk yang dapat digunakan oleh semua program bantuan di berbagai kementerian,” jelasnya.

Sebagai penutup, Jalal Abdul Nasir mengajak para santri untuk menggunakan media sosial sebagai sarana berbagi kebaikan dan menyebarkan informasi tentang kiprah Fraksi PKS di parlemen serta kerja-kerja kader di lapangan.

“Mari manfaatkan media sosial untuk mendekatkan PKS dengan masyarakat dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan publik,” pungkasnya.



“Negara memiliki kewajiban membayar utang luar negeri yang besar, sementara kondisi ekonomi nasional sedang lesu. Oleh karena itu, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tak terhindarkan,

H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII



Beri Edukasi Santri SMA Quran
Eltahfidh Cileungsi,

Achmad Ru'yat Ajak Anak Muda Tidak Apolitik

Jakarta (25/2) – Anggota DPR RI Fraksi PKS Achmad Ru'yat menerima kunjungan edukasi dari SMA Qur'an Eltahfidh Cileungsi di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (25/02).

Rombongan yang diketuai oleh Jalaludin Hafizi ini mengunjungi Gedung DPR sebagai program rutin guna meningkatkan motivasi para santri untuk menjadi pemimpin di masa depan.

"Alhamdulillah kunjungan ini adalah program tahunan. Kami rutin tiap tahun kesini (Gedung DPR/MPR). Kunjungan ke Gedung DPR RI ditujukan agar bertemu anggota dewan untuk mendapatkan motivasi. Kami meyakini bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan," ujar Ust. Jalaludin.

Para santri diterima oleh Achmad Ru'yat sembari mengingatkan untuk terus meningkatkan pengetahuan politiknya.

"Ini menjadi pendidikan politik untuk generasi muda, supaya pemuda tidak menjadi apolitis. Kadang generasi muda melihat perilaku politik yang diungkap di masyarakat itu perilaku yang kurang baik, akhirnya mereka jadi apolitis. Pendidikan politik itu penting, di negara kita kalau mau jadi pemimpin harus punya kenda-

raan berupa partai politik," jelas Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat V tersebut.

Ru'yat juga menyampaikan optimismenya agar negara kita menjadi negara yang betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh para pendiri bangsa.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi di mana para santri diberikan kesempatan untuk bertanya maupun meny-

ampaikan aspirasinya. Berbagai topik dibahas oleh para santri, mulai dari pro-kontra pemerintahan, Mekan Bergizi Gratis, hingga efisiensi.

"Selama jalannya pemerintahan ini apakah banyak pro kontra nya kepada anggota dewan? Bagaimana tanggapan-nya?" ujar salah satu santri.

Dalam sesi diskusi ini Ru'yat menyampaikan pentingnya penyeimbang dalam Pemerintahan. Ia juga mengakhiri kegiatan edukasi dengan sesi pemberian cinderamata serta sesi foto bersama.

"Dalam pemerintahan pasti ada pro dan kontra. Dalam pemerintahan itu baiknya seimbang, ada yang berperan penyeimbang supaya program bisa berjalan baik," pungkash Ru'yat.

"Ini menjadi pendidikan politik untuk generasi muda, supaya pemuda tidak menjadi apolitis. Kadang generasi muda melihat perilaku politik yang diungkap di masyarakat itu perilaku yang kurang baik, akhirnya mereka jadi apolitis. Pendidikan politik itu penting, di negara kita kalau mau jadi pemimpin harus punya kendaraan berupa partai politik,"

drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat V

Terima Audiensi ARSSI Priangan Timur,

Kurniasih Bertekad Advokasi Penyelesaian Permasalahan Pending Claim BPJS Kesehatan

Jakarta (25/2) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menerima audiensi dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Priangan Timur

di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (25/2)

Kunjungan ini merupakan audiensi serta penyampaian aspirasi terkait permasalahan kerja sama antara rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan, terutama terkait pending claim atau klaim yang terhambat.

"Saat ini di Indonesia 65% rumah sakit itu merupakan rumah sakit swasta, baik yang dikelola secara korporasi maupun soliter. Dari jumlah tersebut, 75%-nya sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga kontribusi dari teman-teman rumah sakit swasta untuk meningkatkan layanan kesehatan sangat besar. Sayangnya, kami memiliki banyak kekhawatiran dalam kerja sama ini khususnya terkait regulasi yang berubah

cepat sekali." ujar lingsan selaku Ketua ARSSI Pusat.

Pihak ARSSI Priangan Timur yang diwakili oleh Teguh memberikan pemaparan terkait apa-apa saja permasalahan yang ada antara rumah sakit swasta di kawasan Priangan Timur dengan BPJS Kesehatan. Dari permasalahan yang ada, poin yang paling disorot adalah perihal kejadian pending claim yang memiliki persentase relatif tinggi.

"Rata-rata dari Juli-Oktober (2024), pending claim di Tasikmalaya itu di angka 25%, di Ciamis bahkan ada yang sampai 50-54%. Kondisi ini sangat memberatkan bagi rumah sakit kecil, terutama terkait cashflow mereka. Tingginya pending claim ini juga disebabkan oleh dokumen yang dianggap tidak sesuai, prosedur klaim yang

dianggap tidak benar, regulasi BPJS yang rumit, hingga sistem BPJS yang belum optimal" ujar Teguh.

Menanggapi hal tersebut, Kurniasih menyampaikan bahwa dirinya dengan tangan terbuka menerima kehadiran rekan-rekan ARSSI.

"Kehadiran rumah sakit swasta tidak bisa dipungkiri berkontribusi besar untuk pelayanan kesehatan masyarakat," ungkapnya.

Kurniasih menyatakan bahwa topik terkait BPJS sebenarnya sudah berkali-kali dibahas dalam rapat Komisi IX. Namun memang realisasinya masih perlu pengawasan lebih lanjut.

"Kami memahami keluhan rekan-rekan dan kebetulan pembahasan ini juga baru saja dibahas oleh kami di Komisi IX. Kesimpulan rapat terakhir itu antara lain mendesak BPJS untuk menyusun perjanjian kerja sama secara adil, efisien, dan harmonis; menyelesaikan dispute claim, hingga meminta ada standarisasi syarat klaim untuk menghindari penolakan



"Kami memahami keluhan rekan-rekan dan kebetulan pembahasan ini juga baru saja dibahas oleh kami di Komisi IX. Kesimpulan rapat terakhir itu antara lain mendesak BPJS untuk menyusun perjanjian kerja sama secara adil, efisien, dan harmonis; menyelesaikan dispute claim, hingga meminta ada standarisasi syarat klaim untuk menghindari penolakan klaim yang subjektif,"

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

klaim yang subjektif," papar Kurniasih.

Lebih lanjut, Kurniasih akan mengadvokasi rekan-rekan ARSSI untuk ke depannya bisa hadir dalam rapat bersama Komisi IX. Ia juga menyatakan terima kasih atas segala masukan

dan aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan ARSSI.

"Terima kasih informasi dan data datanya, kami akan koordinasikan dengan BPJS Kesehatan untuk bisa memperhatikan lagi khususnya kepada RS Swasta," pungkaskan Kurniasih.

Terima Aspirasi Terkait Mafia Tanah PT Satu Stop Sukses,

Ateng Sutisna: Aparat Harus Tegas Selesaikan Persoalan yang Kerap Terjadi

Jakarta (26/2) – Anggota Komisi II DPR RI, Ateng Sutisna, menerima kunjungan aspirasi dari perwakilan PT Satu Stop Sukses, Rizky Syahputra dan tim

di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gd. Nusantara I, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Rabu (26/2).

Pertemuan ini ditujukan untuk menyampaikan dugaan praktik mafia tanah yang menghambat akses lahan perusahaan pengembang perumahan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Rizky Syahputra selaku perwakilan PT Satu Stop Sukses (SSS) mengungkapkan bahwa perusahaan yang diwakilinya mengalami kesulitan untuk mengakses lahan yang telah bersertifikat resmi serta memiliki izin sah. Namun, lahan tersebut dihilangi oleh sekelompok masyarakat yang diduga

mendapat dukungan dari perusahaan lain. Rizky juga mengungkapkan adanya surat garapan yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat, yang setelah ditelusuri, ternyata merupakan dokumen palsu.

"Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Pak Ateng menerima kami. Kami menghadapi permasalahan serius di lapangan, di mana lahan kami yang sudah memiliki sertifikat sah dihalang-halangi oleh kelompok tertentu. Bahkan, muncul surat garapan palsu yang justru semakin memperkeruh keadaan," ungkap Rizky.

Menanggapi aduan ini, Ateng Sutisna menegaskan bahwa kasus sengketa lahan

yang melibatkan mafia tanah merupakan permasalahan yang kerap terjadi di berbagai daerah. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku.

"Kasus seperti ini memang sering kami temui. Kami akan melakukan pendalaman terhadap masalah ini dan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang ada. Namun, persoalan sengketa tanah tidak bisa hanya ditangani oleh Komisi II saja, tetapi juga harus melibatkan komisi lain yang membidangi terkait hukum dan hak asasi manusia," ujar Ateng.

Lebih lanjut, Ateng menegaskan bahwa kunci utama dalam penyelesaian kasus mafia tanah adalah ketegasan aparat penegak hukum. Ia mendorong agar setiap pelaku yang terlibat dalam praktik ilegal ini mendapatkan sanksi yang setimpal agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.

"Kita harus memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Tanpa tindakan hukum yang tegas, mafia tanah akan terus beroperasi dan merugikan banyak pihak," tegasnya.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan ada langkah konkret yang dapat diambil oleh pihak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang dihadapi PT Satu Stop Sukses serta perusahaan-perusahaan lain yang mengalami permasalahan serupa.



"Kita harus memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Tanpa tindakan hukum yang tegas, mafia tanah akan terus beroperasi dan merugikan banyak pihak,"

Ir. H. ATENG SUTISNA

Anggota Komisi II DPR RI





Terima Kunjungan Edukasi
MA Al-Furqoniyah Bogor,

Ledia Hanifa Edukasi Politik dan Motivasi Santri

Jakarta (27/02) -- Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menerima kunjungan edukasi dari Madrasah Aliyah (MA) Pesantren Al-Furqoniyah Bogor di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/02).

Kunjungan bertujuan untuk meningkatkan semangat dan motivasi anak-anak yang sedang dalam masa berkembang. Harapannya mereka bisa mendapatkan inspirasi dengan adanya kunjungan edukasi ini.

"Terima kasih banyak atas kesediaannya. Kunjungan kami ini memang kami tujuikan supaya anak-anak kami bisa berdiskusi dan mendapatkan ilmu yang bisa diambil oleh anak-anak. Mereka lagi masa pertumbuhan mudah-mudahan mendapat inspirasi dari Ibu Dewan." ujar Salwa selaku perwakilan rombongan.

Ledia menyambut baik kunjungan ini. Dalam sambutannya, Ledia menjelaskan berbagai hal terkait lembaga legislatif, khususnya DPR, termasuk penjelasan tentang daerah pemilihan, fraksi dan komisi, hingga kewajiban anggota DPR untuk menyerap aspirasi.

"Setiap anggota itu berasal dari daerah pemilihan, maka mereka punya kewajiban untuk

datang ke daerahnya secara rutin guna menyerap aspirasi. Itu salah satu fungsi anggota dewan ya, sebagai representasi." papar Ledia.

Ledia juga menjelaskan berbagai program andalan Fraksi PKS DPR RI seperti Lomba Baca Kitab Kuning, Lomba Baca Teks Proklamasi, dan Lomba Baca Biografi Tokoh Nasional.

Hal ini disampaikan untuk meningkatkan semangat dan motivasi para santri agar terus fokus belajar agama serta

jangkan pernah melupakan sejarah bangsa.

Kegiatan edukasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Tenaga Ahli Komisi X, Andika. Para santri bersemangat untuk menanyakan berbagai hal terkait DPR dan juga PKS.

"Jika kalian mau menyampaikan pengaduan ke DPR, salah satunya bisa melalui program hari aspirasi seperti sekarang ini yang dimiliki Fraksi PKS. Sejauh ini baru kami yang memiliki program seperti ini. Dengan kanal ini, kami bisa menyerap aspirasi teman-teman semua dan nanti bisa ditindaklanjuti." ujar Andika.

Kegiatan ditutup dengan pemberian cinderamata dan sesi foto bersama. Rombongan kemudian melanjutkan kegiatan dengan berkeliling Kompleks DPR/MPR serta berfoto di ikon Gedung Nusantara.

"Setiap anggota itu berasal dari daerah pemilihan, maka mereka punya kewajiban untuk datang ke daerahnya secara rutin guna menyerap aspirasi. Itu salah satu fungsi anggota dewan ya, sebagai representasi."

**Hj. LEDIA HANIFA A,
S.Si., M.Psi.T**
Anggota Komisi X DPR RI



Pawai Sambut Ramadan

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ajak Masyarakat Persiapkan Fisik agar Ramadan Lebih Baik

Jakarta (23/02) — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan Pawai Sepeda dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1446 H di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta, Ahad, (23/02).

Acara dihadiri dan dibuka oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Anggota DPR RI Fraksi PKS sekaligus Ketua Panitia Ramadan DPP Yanuar Arif Wibowo, para pengurus Bidang Pembinaan Umat DPP PKS dan puluhan

“Mari bersama kita siapkan fisik dengan sebaik-baiknya agar Ramadan 1446 H menjadi Ramadan terbaik dari sebelumnya dan kita bisa memaksimalkan ibadah dalam bentuk apapun sepanjang fisik dan badan kita sehat,”

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS

peserta gowes dari berbagai kalangan.

Dalam sambutan dan pelepasan peserta goes pawai ramadan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan acara ini bukan hanya sekedar gowes, tapi gowes dengan penuh spirit dalam menghadapi bulan Ramadan 1446 H.

“Kesiapan bukan hanya bersifat ilmu dan pengetahuan tentang puasa dan Ramadan saja, akan tetapi perlu persiapan fisik dan jasmani yang harus dipersiapkan,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Pria yang akrab disapa HNW ini menambahkan dengan kesehatan dan kesiapan fisik yang dilakukan setidaknya sudah setengah persiapan yang telah dilakukan.

“Mari bersama kita siapkan fisik dengan sebaik-baiknya

agar Ramadan 1446 H menjadi Ramadan terbaik dari sebelumnya dan kita bisa memaksimalkan ibadah dalam bentuk apapun sepanjang fisik dan badan kita sehat,” tutup HNW.

Sementara itu, Yanuar Arif yang juga Anggota DPR RI Dapil Banyumas Cilacap menambahkan pawai ini merupakan bagian dari program DPP PKS untuk menyambut datang nya bulan ramadhan.

“Ramadan kali ini tema besarnya adalah saling berbagi dan peduli, berbagi dan peduli ini adalah sifat dan karakter bangsa Indonesia yang sekaligus meneguhkan sikap PKS yang hadir di tengah masyarakat untuk membela dan melayani rakyat,” ujar Ketua Panitia Kegiatan Ramadan 1446 H DPP PKS ini.



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[@fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@FPKSDPRRI](https://twitter.com/FPKSDPRRI)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI



Tiktok
[@fraksipksdprri](https://www.tiktok.com/@fraksipksdprri)

***Nantikan
Setiap Pekan***